

RENCANA STRATEGIS

2025 - 2029



BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG

Jl. Dr. Susilo 105 Pahoman, Bandar Lampung.35213.
Telp. 0721-3738056, 0721-3738066,
Email : bpom_lampung@pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BANDAR LAMPUNG
NOMOR HK.02.02.6A.12.25.263 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025-2029

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

- Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
 8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
 9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR DI BANDAR LAMPUNG TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025-2029.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Balai Besar POM di Bandar

Lampung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Renstra Balai Besar POM di Bandar Lampung memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar di Bandar Lampung untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Balai Besar POM di Bandar Lampung sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Balai Besar POM di Bandar Lampung dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai Besar POM di Bandar Lampung.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal : 05 Desember 2025
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG



BAGUS HERI PURNOMO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG
NOMOR HK.02.02.6A.12.25.263 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025-2029

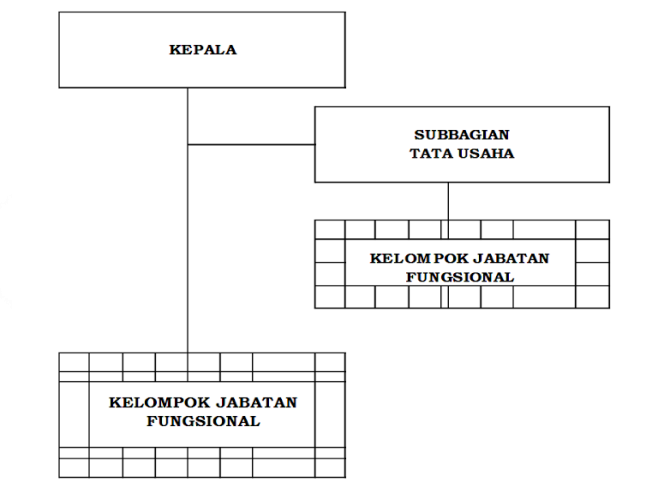
BAB I

PENDAHULUAN

I.1 KONDISI UMUM

Balai Besar POM di Bandar Lampung merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yang berada di Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. BBPOM di Bandar Lampung dalam struktur organisasinya terdiri dari Kepala Balai, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional yang memiliki tugas fungsi Ketatausahaan, fungsi Pengujian, fungsi Pemeriksaan, fungsi Penindakan dan fungsi Infokom (Informasi dan Komunikasi).

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BBPOM di Bandar Lampung

Secara geografis, provinsi Lampung terletak pada $105^{\circ}45'$ BT sampai $103^{\circ}48'$ BT dan $3^{\circ}45'$ LS sampai $6^{\circ}45'$ LS, yang meliputi areal daratan seluas 35.288,35 km², termasuk pulau-pulau kecil pada bagian paling ujung tenggara Pulau Sumatera. Provinsi Lampung dibatasi oleh Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu di sebelah Utara, Selat Sunda di sebelah Selatan, Laut Jawa di sebelah Timur, dan Samudra Indonesia di sebelah Barat. Secara administratif, Provinsi Lampung dibagi menjadi 15 wilayah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 215 kecamatan dan 2.463 desa.

Balai Besar POM di Bandar Lampung mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung merupakan salah satu UPT Badan POM yang ada di wilayah Provinsi Lampung dengan cakupan pengawasan yang meliputi 10 Kabupaten/Kota dari total 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Cakupan wilayah pengawasan BBPOM di Bandar Lampung meliputi Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pesisir Barat (Gambar 1.2).



Gambar 1.2 Cakupan Wilayah Kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung

Dalam melaksanakan tugas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, BBPOM di Bandar Lampung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
5. Pelaksanaan sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
8. Pelaksanaan pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui siber;

11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Selain fungsi di atas, sebagaimana mandat Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, seluruh Kementerian/Lembaga termasuk BBPOM di Bandar Lampung (BBPOM) diberi amanat untuk melaksanakan pengarusutamaan gender sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing. Hal ini tertuang pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yaitu dengan penerapan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung. BBPOM di Bandar Lampung terus berupaya mengambil langkah-langkah signifikan dalam pengarusutamaan gender dan inklusi sosial (PUGIS), terutama dalam hal pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta penyediaan layanan publik yang aksesibel. Untuk mencapai hasil yang lebih substansial, BBPOM di Bandar Lampung senantiasa memperkuat komitmen dan memperluas implementasi PUGIS.

Kontribusi BBPOM di Bandar Lampung terhadap kesehatan publik sangat signifikan. Melalui pengawasan produk yang ketat, BBPOM di Bandar Lampung membantu mencegah masuknya produk berbahaya dan menjamin bahwa masyarakat memiliki akses terhadap produk yang aman dan berkualitas. Sehingga dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengurangan risiko kesehatan yang diakibatkan oleh produk yang tidak memenuhi standar.

BBPOM di Bandar Lampung beroperasi dalam konteks yang dinamis dan penuh tantangan, terutama karena kompleksitas dan pertumbuhan pesat industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Inovasi teknologi, globalisasi, dan perubahan pola penyakit dan konsumsi masyarakat menuntut BBPOM di Bandar Lampung untuk terus meningkatkan kesiapsiagaannya dalam mengawasi produk yang beredar di pasar.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BBPOM di Bandar Lampung untuk periode 2025-2029 diinisiasi sebagai respons terhadap tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Renstra BBPOM di Bandar Lampung tahun 2025-2029 dirancang untuk tidak hanya menanggapi tantangan saat ini tetapi juga untuk mengantisipasi perubahan masa depan dalam industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Pendekatan ini memungkinkan BBPOM di Bandar Lampung untuk tetap relevan dan efektif dalam menjalankan tugasnya, mengingat cepatnya inovasi dan perubahan dalam sektor ini.

Renstra BBPOM di Bandar Lampung 2025-2029 menandai langkah maju dalam upaya untuk terus melindungi kesehatan dan keselamatan publik. Melalui implementasi strategi yang terencana dan terarah, BBPOM di Bandar Lampung bertekad untuk menghadapi tantangan masa depan dengan kepercayaan dan keunggulan, memastikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, berkualitas, dan efektif.

I.1.1 Capaian Kinerja Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Tahun 2020-2024

Capaian indikator kinerja Balai Besar POM di Bandar Lampung selama kurun waktu 2020-2024 adalah sebagai berikut:

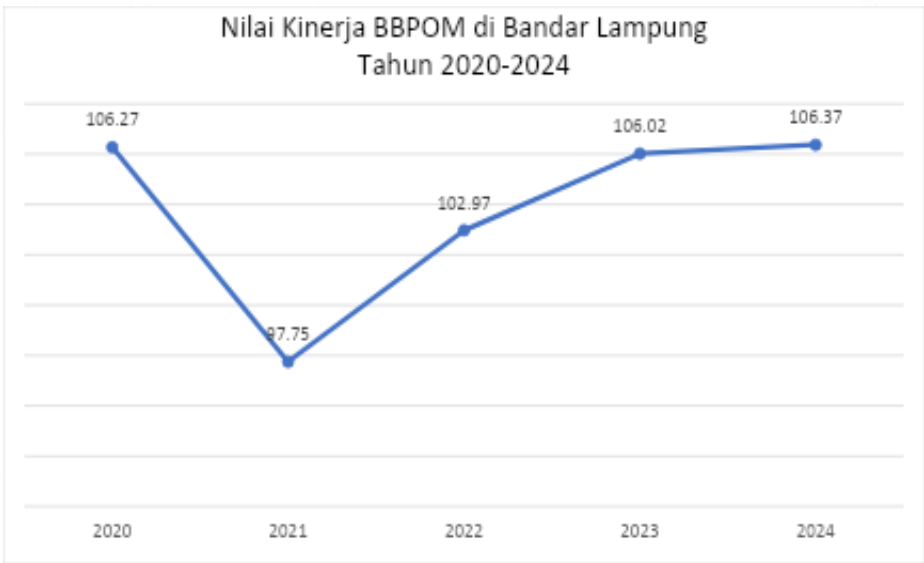
Tabel 1.2 Realisasi Indikator Kinerja BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2020-2024

	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
SK.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi Syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung															
Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,80	93,23	115,38	93,00	91,17	98,03	93,50	96,76	103,49	94,50	94,45	99,95	96,00	92,96	96,83
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78,00	78,57	100,73	80,00	82,93	103,66	82,00	94,98	115,83	90,00	92,03	102,26	93,50	92,27	98,68
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85,00	89,84	105,69	89,00	91,55	102,87	90,00	91,45	101,61	91,00	94,34	103,67	94,40	90,79	96,18
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	60,00	61,88	103,13	62,00	79,03	127,47	63,00	76,67	121,70	80,00	90,16	112,70	90,20	89,21	98,90
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat				90,00	80,00	88,89	91,00	70,91	77,92	80,00	81,90	102,38	85,00	85,33	100,39
SK.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan mutu Obat dan Makanan															
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	71,00	82,64	116,39	85,00	71,20	83,76	87,00	75,29	86,54	80,00	88,16	110,20	91,00	95,37	104,80
SK.3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung															
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian Bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86,00	94,30	109,65	91,10	90,20	99,01	92,30	98,60	106,83	93,40	96,00	102,78	97,30	98,02	100,74
Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71,00	77,72	109,46	79,54	66,78	83,96	81,37	77,51	95,26	83,19	87,51	105,19	87,60	88,74	101,30
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	87,00	92,08	105,84	92,50	94,32	101,97	93,00	95,62	102,82	93,50	95,74	102,40	96,25	96,82	100,59
SK.4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung															
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87,00	93,65	107,64	94,00	100,00	106,38	95,00	100,00	105,26	96,00	99,61	103,76	99,80	100	100,20
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57,30	59,65	104,10	64,00	41,98	65,59	71,00	74,85	105,42	71,00	78,03	109,90	78,10	71,44	91,47
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00	99,63	117,21	99,00	99,68	100,69	99,00	99,89	100,90	99,00	99,78	100,79	100,00	99,8	99,8
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	50,00	58,78	117,56	59,00	50,00	84,75	63,00	64,17	101,86	66,00	64,97	98,44	70,00	71,62	102,31
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	56,31	93,85	60,00	66,56	110,93	63,00	67,08	106,48	66,00	68,67	104,05	68,70	70,84	103,11

	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
Indeks Pelayanan Publik	3,51	4,17	118,80	4,35	4,50	103,45	4,45	4,46	100,22	4,40	4,78	108,64	4,85	4,87	100,41
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik							77,00	97,29	126,35	79,00	100,00	126,58	100,00	100	100
Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota													95,00	92,77	97,65
SK.5 Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung															
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	86,62	93,17	107,56	94,50	93,35	98,78	95,90	95,06	99,12	97,40	97,96	100,57	98,80	99,56	100,77
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	16,00	18,00	112,50	40,00	40,00	100,00	59,00	60,00	101,69	78,00	80,00	102,56	97,00	100	103,09
Jumlah desa pangan aman	7,00	7,00	100,00	16,00	16,00	100,00	25,00	25,00	100,00	33,00	33,00	100,00	42,00	42	100
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	2,00	2,00	100,00	4,00	4,00	100,00	7,00	7,00	100,00	10,00	10,00	100,00	13,00	13	100
SK.6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung															
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85,00	91,28	107,39	100,00	90,74	90,74	100,00	99,90	99,90	100,00	120	120,00	100,00	100	100
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	86,00	91,19	106,03	100,00	91,68	91,68	100,00	100,00	100,00	100,00	120,00	120,00	100,00	100	100
SK.7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung															
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	39,00	55,43	142,13	69,00	82,42	119,45	73,00	96,25	131,85	77,00	72,92	94,70	81,00	100	123,46
SK.8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Bandar Lampung yang optimal															
Indeks RB BBPOM di Bandar Lampung	85,00	79,80	93,88	83,50	83,46	99,95	86,00	91,00	105,81	88,50	90,37	102,11	91,37	87,38	95,63
Nilai AKIP BBPOM di Bandar Lampung	80,00	74,74	93,43	75,70	74,22	98,04	76,70	76,19	99,34	77,70	79,12	101,83	80,50	80,58	100,10
Nilai Pengelolaan Kearsipan													88,07	90,9	103,21
SK.9 Terwujudnya SDM BBPOM di Bandar Lampung yang berkinerja optimal															
Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandar Lampung	75,00	77,50	103,33	77,00	83,08	107,90	78,00	84,14	107,87	79,00	88,03	111,43	90,66	87,68	97,10
SK.10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan															
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	85,00	67,70	79,65	73,00	73,41	100,56	78,00	81,00	103,85	83,00	82,78	99,73	84,50	87,22	103,22
Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandar Lampung yang optimal	1,50	1,58	105,33	2,00	1,125	56,25	2,25	2,90	128,89	2,50	2,90	116,00	3,00	3,00	100,00
SK.11 Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandar Lampung secara Akuntabel															
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandar Lampung	93,00	85,75	92,20	90,00	90,09	100,10	90,60	88,99	98,22	91,80	89,04	96,99	89,11	92,24	103,51

	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa													87,53	100	114,25
Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara													60	97,73	162,88
Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri													60	65,93	109,88

Selama (empat) tahun terakhir, nilai kinerja BBPOM di Bandar Lampung periode 2020 hingga 2024 bergerak secara fluktuatif dengan terjadinya penurunan kinerja pada tahun 2021 namun kembali terus meningkat pada tahun 2022 sampai dengan 2024 mengimplikasikan bahwa BBPOM di Bandar Lampung terus melakukan perbaikan kinerja. Hal ini terlihat dari peningkatan nilai kinerja sebagaimana pada Gambar 2.1.



Sumber: Laporan Kinerja BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2024

Gambar 1.2 Nilai Kinerja BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2020-2024

Pengukuran kinerja BBPOM di Bandar Lampung mengacu pada Sasaran Kegiatan yang disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BBPOM di Bandar Lampung dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki. Dalam penyusunan Sasaran Kegiatan, BBPOM di Bandar Lampung menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu *stakeholder perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth*

perspective. Kegiatan prioritas BBPOM di Bandar Lampung selama periode 2020 - 2024 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan standar/regulasi/kebijakan teknis yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu dalam rangka perlindungan bagi masyarakat, memberikan dukungan daya saing produk serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dimana selama tahun 2020-2023 telah disusun 135 standar/regulasi/pedoman di bidang Obat dan Makanan oleh BPOM.
2. Pelaksanaan pendampingan dan rekomendasi perizinan yang merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. BBPOM di Bandar Lampung melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan pemahaman terhadap persyaratan, asistensi dalam proses registrasi baik dalam hal pemenuhan persyaratan teknis maupun akses teknologi online yang diterapkan dalam proses registrasi produk.
3. Pengawasan produk setelah beredar bertujuan untuk memastikan konsistensi produk terhadap data yang disampaikan dan disetujui saat perizinan melalui inspeksi di sarana produksi dan sarana distribusi, sampling dan pengujian produk, farmakovigilans, serta pengawasan penandaan dan iklan produk.
4. Laboratorium di BBPOM di Bandar Lampung berperan penting dalam sistem pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di wilayah kerja provinsi Lampung. Sebagai bagian dari jaringan Laboratorium Pengawas Obat dan Makanan (POM) yang tersebar di seluruh Indonesia, BBPOM di Bandar Lampung berkoordinasi dengan laboratorium regional dan laboratorium utama di Kantor Pusat BPOM, yaitu Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengujian dalam menjamin setiap produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat, melindungi kesehatan masyarakat dari risiko produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak aman. Kemampuan pengujian yang beragam mulai dari analisis mikrobiologis hingga pengujian kimia, memungkinkan untuk melakukan pengawasan menyeluruh terhadap berbagai aspek produk sediaan farmasi dan pangan olahan. Kemampuan ini memastikan komitmen BBPOM di Bandar Lampung dalam menjaga standar kesehatan masyarakat yang tinggi.

5. Pengumpulan data Patroli Siber Obat dan Makanan merupakan kegiatan pengawasan peredaran Obat dan Makanan di media daring. Pada pelaksanaannya, BBPOM di Bandar Lampung berkoordinasi dengan BPOM pusat yang kemudian akan berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta asosiasi *e-commerce*, dalam hal ini idEA (*Indonesian E-commerce Association*). Terhadap temuan yang ada, dilakukan penurunan konten secara kolaboratif dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan idEA.
6. Peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku serta mendorong masyarakat agar dapat melindungi dirinya sendiri dari produk Obat dan Makanan yang berbahaya bagi kesehatan, BBPOM di Bandar Lampung melaksanakan program strategis pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE).
7. Dalam rangka mewujudkan pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi masyarakat, BBPOM di Bandar Lampung telah mengembangkan Program Desa, Pasar, dan Sekolah Pangan Aman selama periode 2020–2024 sehingga mendorong terbangunnya budaya sadar pangan aman sejak dini. Capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat sistem keamanan pangan nasional serta menjadi pondasi penting untuk melanjutkan strategi pembangunan pangan aman yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.
8. Revitalisasi Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial pada bidang Pengawasan Obat dan Makanan.

BBPOM di Bandar Lampung memiliki 11 Sasaran Kegiatan (SK) dan 34 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK). Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja pada setiap Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan (SK1)

Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung

Dalam mewujudkan obat dan makanan yang memenuhi syarat, BBPOM di Bandar Lampung melaksanakan serangkaian proses bisnis yang sistematis pada area *pre-market* maupun *post-market*. Pengawasan *pre-market* dilakukan melalui sertifikasi fasilitas produksi obat, kosmetik, obat tradisional dan pangan olahan untuk memastikan fasilitas produksi memenuhi standar produksi produk yang relevan. Sertifikasi juga dilakukan terhadap sarana distribusi obat melalui sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB).

Pada area *post-market*, sampling produk dilaksanakan dengan mengacu kepada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 35 tahun 2024 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Pelaksanaan sampling dilaksanakan dengan metode random dan targeted. Pelaksanaan sampling secara random dilakukan untuk merepresentasikan titik distribusi, kelas terapi obat, klaim obat tradisional, klaim kosmetik dan kategori pangan. Selain itu, juga dilaksanakan sampling produk secara targeted dengan penetapan produk berbasis risiko seperti riwayat pengujian sebelumnya, riwayat penarikan produk dan isu-isu produk yang terkait kesehatan masyarakat.

Produk yang disampling kemudian diuji di laboratorium sesuai dengan parameter uji yang mengacu kepada kompendial yang berlaku. Hasil pengujian digunakan sebagai dasar untuk menentukan apakah suatu produk memenuhi syarat.

Sebagai upaya untuk mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan ini, BBPOM di Bandar Lampung memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha tentang regulasi terbaru seperti cara produksi yang baik, cara distribusi yang baik, standar label, klaim, penggunaan bahan tambahan pangan dan batas cemaran. Selain itu, BBPOM di Bandar Lampung juga menyediakan pendampingan teknis bagi pelaku usaha agar mampu menghasilkan produk yang memenuhi syarat.

BBPOM di Bandar Lampung juga memberikan akses kepada masyarakat untuk melakukan pelaporan produk yang diduga tidak memenuhi syarat mutu, fasilitas produksi ilegal dan pelaporan produk diduga palsu melalui platform pengaduan resmi yaitu *call me back* ulun lampung.

Upaya internal seperti penguatan kapasitas laboratorium dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia juga terus dilakukan untuk menjamin pelaksanaan sampling dan pengujian dilakukan dengan metode yang *reliable*. Capaian kinerja dari SK1 mengalami fluktuasi sebagai berikut:

Tabel 1.3 Nilai SK 1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2020-2024

No.	Sasaran Kegiatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
SK1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	106,24	102,69	103,77	104,19	98,20

Balai Besar POM di Bandar Lampung berkomitmen untuk mewujudkan obat dan makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja UPT dengan didukung oleh 5 indikator: (1) Persentase Obat yang memenuhi syarat, (2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat, (3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, (4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dan (5) Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat.

(1) Persentase Obat yang memenuhi syarat

Tabel 1.4 Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	80,80	93,23	115,38
2021	93,00	91,17	98,03
2022	93,50	96,76	103,49
2023	94,50	94,45	99,95
2024	96,00	92,96	96,83

Berdasarkan data di atas, terlihat adanya fluktuasi dalam realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat dari tahun ke tahun. Tahun 2022 menunjukkan realisasi tertinggi sebesar 96,76%, namun di tahun 2021 menunjukkan realisasi terendah sebesar 91,17%. Pada tahun 2021, terjadi penurunan persentase capaian obat yang memenuhi syarat, hal ini dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang mencapai puncaknya di tahun tersebut menyebabkan pemilihan sarana tempat sampling terbatas. Begitu juga dengan kemampuan parameter pengujian terhadap produk obat masih kurang dibandingkan dengan

jenis produk obat yang beredar dikarenakan pembelian sampel dilakukan secara online yang jenis produknya lebih bervariasi dibandingkan pembelian offline. Peningkatan signifikan di tahun 2022 dikarenakan sistem Regionalisasi Laboratorium yang telah dimulai sehingga pengujian yang dilakukan lebih fokus pada parameter khusus yang telah ditentukan. Tahun 2023 realisasi mengalami penurunan dari 2022 tetapi masih lebih tinggi dibanding 2020 dan 2021, yang menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam pencapaian target. Penurunan persentase juga terjadi di tahun 2024. Hal ini terjadi dikarenakan pada tahun 2024 jumlah penandaan label kosmetik yang Tidak Memenuhi Ketentuan cukup tinggi. Hal ini menyumbang tingginya jumlah kesimpulan akhir sampel yang Tidak Memenuhi Syarat. Diperlukan inovasi dan strategi yang lebih efektif dalam pengawasan sampel Obat yang beredar dan memastikan kepatuhan pelaku usaha dalam produksi maupun terkait dengan penandaan produk, sehingga capaian dapat melebihi target yang telah ditetapkan. Selain itu diperlukan juga koordinasi intensif dengan Badan POM serta UPT BBPOM/BPOM dimana produsen dari produk TMS itu berada mengingat sebagian besar produk yang TMS maupun TMK label berasal dari luar Propinsi Lampung.

(2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat

Tabel 1.5 Capaian Kinerja Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	78,00	78,57	100,73
2021	80,00	82,93	103,66
2022	82,00	94,98	115,83
2023	90,00	92,03	102,26
2024	93,50	92,27	98,68

Pada kurun waktu tahun 2020 hingga 2022 realisasi persentase sampel makanan memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM Bandar Lampung mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kepatuhan pelaku usaha industri pangan terhadap regulasi, serta peningkatan efektivitas pengawasan oleh BBPOM di Bandar Lampung pada tahun ke tahun. Pada tahun 2023, realisasi atas persentase sampel makanan memenuhi syarat mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, namun nilai

tersebut masih lebih tinggi dari target tahun 2023. Pada tahun 2024 realisasi atas persentase sampel makanan memenuhi syarat meningkat 0,24% daripada realisasi tahun 2023, namun lebih rendah daripada target. Secara umum, capaian sampel makanan memenuhi syarat sepanjang tahun 2020 hingga 2023 selalu di atas 100%, menunjukkan kinerja pengawasan oleh BBPOM di Bandar Lampung dalam mencapai target pengawasan pada kurun waktu tahun tersebut efektif. Pada tahun 2024 capaian mengalami penurunan menjadi 98,68%, karena realisasi tahun 2023 dan 2024 tidak berbeda signifikan namun target tahun 2024 lebih tinggi daripada target tahun 2023. Nilai realisasi yang hampir mirip pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa dalam dua tahun terakhir menunjukkan stabilitas mutu makanan yang beredar dan kinerja pengawasan berjalan dengan baik. Namun demikian, tetap diperlukan inovasi, penyusunan strategi yang lebih efektif, dan perhatian terhadap tantangan pengawasan sampel makanan yang beredar dengan memastikan kepatuhan pelaku usaha dalam produksi dan distribusi sampel makanan, sehingga capaian dapat melebihi target yang telah ditetapkan.

(3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Tabel 1.6 Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	85,00	89,84	105,69
2021	89,00	91,55	102,87
2022	90,00	91,45	101,61
2023	91,00	94,34	103,67
2024	94,40	90,79	96,18

Berdasarkan data di atas, terlihat adanya fluktuasi dalam persentase obat yang aman dan bermutu dari tahun ke tahun. Capaian IKU tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 94,34%, yang menunjukkan efektivitas pengawasan dan kepatuhan pelaku usaha cukup optimal pada tahun tersebut. Penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2024 menjadi 90,79% menunjukkan adanya peningkatan jumlah produk Obat yang Tidak Memenuhi Syarat. Penurunan ini terjadi dikarenakan pada awal tahun 2024 jumlah hasil evaluasi penandaan label kosmetik yang Tidak Memenuhi Ketentuan cukup tinggi. Hal ini menyumbang tingginya jumlah kesimpulan akhir sampel yang Tidak Memenuhi

Syarat. Diperlukan inovasi dan strategi yang lebih efektif dalam pengawasan sampel Obat yang beredar dan memastikan kepatuhan pelaku usaha dalam produksi maupun terkait dengan penandaan produk, sehingga capaian dapat melebihi target yang telah ditetapkan. Selain itu diperlukan juga koordinasi intensif dengan Badan POM serta UPT BBPOM/BPOM lain dimana produsen dari produk TMS itu berada mengingat sebagian besar produk yang TMS maupun TMK label berasal dari luar Propinsi lampung.

(4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Tabel 1.7 Capaian Kinerja Indikator Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	60,00	61,88	103,13
2021	62,00	79,03	127,47
2022	63,00	76,67	121,70
2023	80,00	90,16	112,70
2024	90,20	89,21	98,90

Pada tahun 2020 - 2023, realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu selalu melebihi target tahun berjalan sehingga capaiannya lebih dari 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pengawasan makanan yang beredar di wilayah kerja BBPOM Bandar Lampung efektif. Pada tahun 2024 realisasi atas kinerja pengawalan persentase makanan aman dan bermutu tidak berbeda signifikan dengan realisasi tahun 2023. Namun demikian, target tahun 2024 naik 10,2% dari target tahun 2023. Hal ini mengakibatkan capaian kinerja tahun 2024 tampak menurun dan tidak mencapai 100%.

(5) Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

Tabel 1.8 Capaian Kinerja Indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Tahun 2021-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	Indikator dimulai tahun 2021		
2021	90,00	80,00	88,89
2022	91,00	70,91	77,92

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2023	80,00	81,90	102,38
2024	85,00	85,33	100,39

Capaian kinerja pengawalan persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat yang beredar di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung pada tahun 2023 dan 2024 lebih dari 100%. Nilai ini meningkat daripada capaian kinerja tahun 2021-2022. Pada tahun 2020 belum diperoleh realisasi dan capaian karena indikator penilaian kinerja pangan fortifikasi yang memenuhi syarat baru berlaku pada tahun 2021. Capaian kinerja lebih dari 100% menunjukkan efektivitas pengawasan dan keberhasilan kinerja pada tahun berjalan. Peningkatan nilai capaian pada tahun 2023 dan 2024 disebabkan adanya peningkatan kesadaran pelaku usaha pada sarana produksi dan sarana distribusi sampel pangan fortifikasi. Selain itu, peningkatan capaian juga berkaitan dengan adanya penurunan target pada tahun 2023 dan 2024 dibandingkan target tahun 2021 dan 2022.

2. Sasaran Kegiatan (SK2)

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan mutu Obat dan Makanan.

Salah satu sasaran kegiatan yang menjadi prioritas Balai Besar POM di Bandar Lampung pada tahun 2024 adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan. Kesadaran ini diukur melalui indikator (1) Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung. Untuk mencapai target, berbagai kegiatan telah dirancang, seperti sosialisasi regulasi melalui media cetak dan digital, penyelenggaraan kampanye publik, seminar edukasi, serta kerja sama dengan komunitas lokal. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam melaporkan produk yang tidak aman melalui kanal pengaduan resmi juga dioptimalkan. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan mereka dapat lebih selektif dalam memilih produk, mendukung pengawasan, dan berkontribusi dalam terciptanya ekosistem obat dan makanan yang aman dan berkualitas.

Meskipun upaya-upaya tersebut telah dilaksanakan, upaya peningkatan kesadaran masyarakat ini masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan infrastruktur, teknologi dan sumber daya manusia. Infrastruktur yang kurang memadai menjadi kendala untuk menjangkau daerah- daerah terpencil di Provinsi Lampung, selain itu akses internet di daerah perifer tersebut juga seringkali terbatas dan kurang optimal. Pelaksanaan kegiatan edukasi dan sosialisasi juga terbatas oleh jumlah Pengawas Farmasi Makanan yang tidak sebanding dengan luasnya cakupan wilayah. Capaian dari SK2 selama kurun waktu 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.9 Nilai SK.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2020-2024

No.	Sasaran Kegiatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
SK2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	116,39	83,76	86,54	110,20	104,80

(1) Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung

Tabel 1.10 Capaian Kinerja Indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	71,00	82,64	116,39
2021	85,00	71,20	83,76
2022	87,00	75,29	86,54
2023	80,00	88,16	110,20

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	91,00	95,37	104,80

Berdasarkan data yang diberikan, berikut adalah nilai Indeks Kesadaran Masyarakat yang tercatat untuk lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, nilai indeks kesadaran masyarakat tercatat cukup tinggi di angka 82,64, namun terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2021 menjadi 71,20. Setelah itu, terjadi pemulihan yang cukup pesat pada tahun 2022 dengan angka 75,29, dan kembali meningkat dengan tajam pada tahun 2023 menjadi 88,16 dan mencapai puncaknya pada tahun 2024 di angka 95,37. Peningkatan yang cukup besar ini menunjukkan adanya perkembangan positif dalam peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pemilihan obat dan makanan yang aman dan bermutu, yang menjadi tujuan utama Badan POM dalam menjalankan kegiatan edukasi dan sosialisasi.

Pada tahun 2021, terdapat penurunan yang cukup signifikan pada indeks kesadaran masyarakat, yaitu dari 82,64 (2020) menjadi 71,20 (2021). Penurunan ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain Adanya Tantangan eksternal, seperti adanya pandemi COVID-19 yang mengganggu pelaksanaan kegiatan edukasi, baik secara langsung maupun melalui media massa. Pembatasan sosial dan kegiatan yang terbatas bisa menyebabkan kurangnya interaksi langsung dengan masyarakat dan menyulitkan penyebaran informasi mengenai obat dan makanan yang aman. Adanya Perubahan pola perilaku masyarakat yang lebih fokus pada masalah kesehatan dan keselamatan lainnya selama pandemi, sehingga mungkin menyebabkan penurunan perhatian terhadap topik mengenai obat dan makanan. Adanya Gangguan pada program komunikasi dan sosialisasi, yang mungkin terdampak oleh keterbatasan sumber daya, pengurangan anggaran, atau kesulitan dalam mencapai seluruh lapisan masyarakat selama masa sulit tersebut. Namun, meskipun penurunan ini terjadi, program-program Badan POM tetap berusaha untuk mengedukasi masyarakat dengan cara yang lebih adaptif

Setelah penurunan pada tahun 2021, terjadi pemulihan yang signifikan pada tahun 2022 dengan indeks 75,29 dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2023, indeks naik tajam ke 88,16, dan pada tahun 2024, indeks kesadaran masyarakat mencapai 95,37 menjadi nilai tertinggi

dalam periode ini. Beberapa faktor yang dapat menjelaskan pemulihan dan peningkatan ini adalah:

- Peningkatan efektivitas program KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) oleh Badan POM yang lebih adaptif dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, serta pemanfaatan media digital untuk menyebarkan informasi yang lebih luas dan mudah diakses oleh masyarakat.
- Kegiatan edukasi langsung yang dilakukan oleh Badan POM semakin optimal, bahkan dengan penyesuaian cara penyampaian untuk mengatasi tantangan masa pandemi, seperti penyelenggaraan seminar daring, kampanye digital, dan kolaborasi dengan berbagai pihak.
- Tumbuhnya kesadaran masyarakat yang lebih tinggi terkait pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu, terutama dengan semakin banyaknya informasi yang tersedia di media sosial dan platform digital.

Tahun 2021 dan 2022 menunjukkan kesenjangan antara target dan capaian, dengan pencapaian yang jauh lebih rendah dari target yang ditetapkan. Penurunan ini, sebagaimana telah dibahas sebelumnya, kemungkinan besar disebabkan oleh tantangan eksternal, terutama dalam konteks pandemi COVID-19.

Namun, pencapaian pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa BBPOM di Bandar Lampung berhasil mengatasi hambatan-hambatan tersebut, dengan pencapaian yang melebihi target yang telah ditetapkan. Khususnya pada tahun 2024 dengan nilai 95,37, hasil ini menandakan bahwa upaya yang dilakukan selama beberapa tahun terakhir memberikan dampak yang sangat positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.

Secara keseluruhan, meskipun ada penurunan pada tahun 2021 dan 2022, BBPOM di Bandar Lampung telah menunjukkan kemampuan untuk memulihkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui program-program KIE yang semakin efektif dan adaptif terhadap kondisi terkini. Pencapaian positif pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan keberhasilan upaya yang dilakukan, serta adanya penerimaan yang baik dari masyarakat terhadap pesan-pesan edukasi terkait obat dan makanan yang aman.

3. Sasaran Kegiatan (SK3)

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung

Balai Besar POM di Bandar Lampung berkomitmen untuk meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan sebagai bagian dari prioritas strategis tahun 2024. Sasaran ini diwujudkan melalui 3 indikator utama, yaitu (1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian Bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan, (2) Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan, dan (3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM.

Upaya untuk mencapai target ini melibatkan peningkatan kualitas layanan melalui penyelenggaraan pembinaan yang informatif, transparan, dan berorientasi solusi bagi pelaku usaha, sehingga mereka dapat memahami dan mematuhi regulasi dengan lebih baik. Selain itu, pengawasan yang profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat juga terus diperkuat untuk membangun kepercayaan publik terhadap keamanan dan mutu obat serta makanan yang beredar. Dengan pendekatan yang kolaboratif, Balai Besar POM berusaha menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaku usaha untuk berkembang sekaligus memastikan masyarakat terlindungi dari risiko konsumsi produk yang tidak memenuhi standar. Capaian dari SK3 selama kurun waktu 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.11 Nilai SK.3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2020-2024

No.	Sasaran Kegiatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
SK3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	108,32	94,98	101,63	103,46	100,88

(1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian Bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Tabel 1.12 Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	86,00	94,30	109,65
2021	91,10	90,20	99,01
2022	92,30	98,60	106,83
2023	93,40	96,00	102,78
2024	97,30	98,02	100,74

Berdasarkan tabel di atas, Indeks Kepuasan Pelaku Usaha atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Bandar Lampung mengalami fluktuasi dengan realisasi terendah pada tahun 2021 sebesar 90,20 dengan capaian 99,01%. Hasil tersebut menunjukkan adanya penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yakni realisasi 2022 sebesar 94,30 dengan capaian 109,65%. Faktor yang mungkin berkontribusi terhadap penurunan di tahun 2021 ini antara lain dampak pandemi COVID-19 yang mengganggu efektivitas pelayanan dan pengawasan, pembatasan interaksi langsung yang mempengaruhi komunikasi dan pengawasan serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan yang lebih responsif di tengah situasi darurat kesehatan. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2021, indeks kembali meningkat di tahun 2022 yakni realisasi 98,60 melampaui target dengan capaian 106,83%. Hasil melampaui target juga terus bertahan sepanjang tahun 2023 dan 2024 meskipun mengalami fluktuasi dengan capaian 102,78% dan 100,74% kategori “Sangat Baik”. Capaian kinerja lebih dari 100% tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam layanan kepada pelaku usaha dan keberhasilan kinerja pada tahun berjalan.

(2) Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Tabel 1.13 Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	71,00	77,72	109,46
2021	79,54	66,78	83,96
2022	81,37	77,51	95,26
2023	83,19	87,51	105,19
2024	87,60	88,74	101,30

Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Bandar Lampung mengalami fluktuasi dengan titik terendah pada tahun 2021, tetapi berhasil pulih dan mengalami peningkatan signifikan pada 2023 dan 2024. Indeks kepuasan masyarakat mengalami penurunan tajam pada tahun 2021 dengan nilai 66,78, yang jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya (77,72). Faktor yang mungkin berkontribusi terhadap penurunan ini antara lain dampak pandemi COVID-19 yang mengganggu efektivitas layanan dan pengawasan, pembatasan interaksi langsung yang mempengaruhi komunikasi dan transparansi pengawasan serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan yang lebih responsif di tengah situasi darurat kesehatan. Setelah penurunan pada 2021, indeks kembali meningkat menjadi 77,51 pada 2022. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam layanan dan efektivitas pengawasan seperti digitalisasi layanan (inovasi *CALL ME BACK ULUN LAMPUNG*) dan penguatan koordinasi dengan stakeholder serta peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait keamanan obat dan makanan. Tahun 2023 mencatat lonjakan signifikan dalam kepuasan masyarakat dengan nilai 87,51, diikuti oleh peningkatan lebih lanjut menjadi 88,74 pada 2024. Peningkatan ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor utama seperti penguatan pengawasan berbasis risiko, peningkatan jumlah inspeksi, dan ketegasan dalam penegakan hukum. Lebih lanjut faktor adopsi teknologi dalam pengawasan dan layanan pengaduan yang lebih cepat dan transparan juga meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja

BBPOM di Bandar Lampung. Sepanjang tahun 2024 ini BBPOM Bandar Lampung melakukan 3 kali kegiatan Serasi (*Sharing* dan Edukasi Regulasi BPOM) dan mendapatkan respon positif dari masyarakat dilihat dari jumlah peserta yang meningkat dari waktu ke waktu.

(3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

Tabel 1.14 Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	87,00	92,08	105,84
2021	92,50	94,32	101,97
2022	93,00	95,62	102,82
2023	93,50	95,74	102,40
2024	96,25	96,82	100,59

Berdasarkan data menunjukkan dari tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan target mengalami peningkatan, dan realisasinya melampaui target yang ditetapkan di masing-masing tahun tersebut.

Ini merupakan upaya bersama dari semua petugas layanan untuk konsisten dalam memberikan survey kepada pelanggan, dan penilaian dari pelanggan melalui survey menunjukkan pelanggan memberikan apresiasi yang baik kepada BBPOM di Bandar Lampung.

4. Sasaran Kegiatan (SK4)
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung.

BBPOM di Bandar Lampung mempunyai tanggungjawab dalam menjamin produk yang beredar di masyarakat aman dan bermutu. Pengawasan obat dan makan senantiasa menghadapi lingkungan startegis yang dinamis. Penyelarasan strategi dalam pemeriksaan sarana dengan lintas sektor sangat dibutuhkan dalam peningkatan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan.

Proses bisnis dalam pelaksanaan pemeriksaan sarana meliputi perencanaan, pelaksanaan, rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dan monitoring dan

evaluasi terhadap rekomendasi yang ditetapkan. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BBPOM di Bandar Lampung, maka perlu disusun suatu strategi dan rencana yang tepat. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkat efektivitasnya melalui perumusan strategi dan langkah yang tepat. Capaian Sasaran Kegiatan diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut: (1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan; (2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan; (3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu; (4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan; (5) Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan, (6) Indeks Pelayanan Publik; (7) Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik; (8) UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK4 yaitu menetapkan perencanaan prioritas pengawasan berdasarkan analisis resiko; meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor terkait tindak lanjut hasil pengawasan; mensosialisasikan kembali Inpres 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dan Permendagri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah kepada lintas sektor.

Koordinasi internal antar bagian di BBPOM di Bandar Lampung terkait dengan hasil pengawasan perlu ditingkatkan. Data hasil pemeriksaan sarana dapat dijadikan sebagai input perencanaan program bagian lain seperti target lokus dan materi terkait KIE, peta rawan kasus yang dijadikan target proses penindakan, dan lain-lain.

Sebagai implementasi terkait dengan Inpres No. 3 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 41 Tahun 2018, BPOM telah memberikan Dana Alokasi Fisik Obat dan Makanan (DAK POM) untuk memberikan stimulus kepada pemerintah daerah dalam pengawasan obat dan makanan. BBPOM perlu melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait pembagian target sarana yang akan diperiksa oleh daerah dan BBPOM di Bandar Lampung. Capaian dari SK4 selama kurun waktu 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.15 Nilai SK.4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2020-2024

No.	Sasaran Kegiatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
SK4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	109,86	95,30	105,73	106,51	99,37

(1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Tabel 1.16 Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	87,00	93,65	107,64
2021	94,00	100,00	106,38
2022	95,00	100,00	105,26
2023	96,00	99,61	103,76
2024	99,80	100,00	100,20

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan mencapai di atas 100 persen pada tahun 2020 sampai 2024. Hal ini menunjukkan komitmen petugas dalam mengawal proses pengawasan obat dan makanan serta tindak lanjutnya sudah baik. Namun realisasi pada tahun 2020 dan 2023 cukup rendah meskipun telah mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2023 tidak seluruh rekomendasi hasil Inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT atau hanya sebanyak

1.189 rekomendasi dari total rekomendasi 1.208 yang ditindaklanjuti sehingga capaian tidak mencapai 100%.

(2) Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

Tabel 1.17 Capaian Kinerja Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	57,30	59,65	104,10
2021	64,00	41,98	65,59
2022	71,00	74,85	105,42
2023	71,00	78,03	109,90
2024	78,10	71,44	91,47

Capaian indikator selama periode lima tahun terakhir dengan hasil yang fluktuatif. Pada tahun 2021 terjadi penurunan capaian yang signifikan disebabkan oleh dampak pandemi covid-19. Pemangku kepentingan baik stake holder maupun pelaku usaha lebih berfokus terhadap penanganan covid-19 sehingga pengawasan terhadap keamanan obat dan makanan bukan menjadi hal yang diprioritaskan. Dua tahun pasca pandemi covid-19 terjadi peningkatan capaian indikator ini. Kesadaran *stakeholder* terkait peran penting sektor obat dan makanan dalam pemulihan pasca pandemi Covid-19 semakin meningkat. Kebutuhan obat dan suplemen meningkat saat terjadinya pandemi. Selain obat, makanan yang sehat dan bergizi merupakan kebutuhan utama. Capaian indikator di tahun 2024 mengalami penurunan kembali. Hal ini disebabkan oleh kesadaran dari pelaku usaha terkait pentingnya penerapan pemenuhan standar baik pada sarana produksi dan distribusi yang masih rendah.

(3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Tabel 1.18 Capaian Kinerja Indikator Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	85,00	99,63	117,21
2021	99,00	99,68	100,69
2022	99,00	99,89	100,90
2023	99,00	99,78	100,79
2024	100,00	99,80	99,80

Berdasarkan data di atas, fluktuasi realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dari tahun 2020 hingga 2024 tidak terlalu signifikan yakni berada pada rentang 99,63 - 99,89%. Namun demikian capaian pada tahun 2024 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yakni sebesar 99,80% dikarenakan adanya kenaikan target pada tahun 2024 menjadi 100%. Untuk itu diperlukan strategi, upaya konkrit dan *continuous improvement* untuk pencapaian target di tahun berikutnya.

Terdapat kesalahan perhitungan pada realisasi kinerja pada tahun 2022 dimana semula adalah 99,46% dengan capaian kinerja 100,46% kemudian realisasi kinerja menjadi 99,89% dengan capaian kinerja 100,90% dan telah disesuaikan juga pada matrix analisis tren dan ketercapaian tujuan.

(4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Tabel 1.19 Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	50,00	58,78	117,56
2021	59,00	50,00	84,75
2022	63,00	64,17	101,86
2023	66,00	64,97	98,44
2024	70,00	71,62	102,31

Capaian indikator Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan selama lima tahun terakhir periode renstra mengalami

fluktuatif. Terjadi penurunan yang signifikan di dari tahun 2020 ke 2021 disebabkan karena terjadinya pandemi covid-19. Keterbatasan modal usaha pada saat pandemi menyebabkan pelaku usaha tidak konsisten dalam menerapkan standar di sarana produksi seperti CPPOB, CPOTB dan CPKB. Setelah pasca pandemi pelaku usaha mulai berbenah dalam upaya peningkatan standar cara produksi yang baik. Pada tahun 2023 capaian indikator mengalami penurunan kembali disebabkan karena pertumbuhan UMKM yang semakin pesat yang tidak diimbangi dengan peningkatan komitmen dalam penerapan standar cara produksi yang baik. BBPOM di Bandar Lampung secara aktif melakukan pendampingan terhadap UMKM terhadap penerapan standar cara produksi yang baik sehingga capaian indikator di tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

(5) Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan

Tabel 1.20 Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	60,00	56,31	93,85
2021	60,00	66,56	110,93
2022	63,00	67,08	106,48
2023	66,00	68,67	104,05
2024	68,70	70,84	103,11

Capaian indikator persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan pada kurun waktu lima tahun terakhir periode renstra berada di garis linier yaitu dengan nilai sangat baik. Pada kurun awal capaian tahun 2020 dengan capaian masih cukup. Masih banyak ditemukan sarana distribusi obat dan makanan yang mengedarkan produk yang belum memiliki izin edar pada kurun waktu tersebut. Seiring dengan literasi masyarakat dan pelaku usaha yang semakin meningkat dari tahun ke tahun terkait keamanan dan mutu obat dan makanan maka membawa dampak terhadap capaian hasil indikator ini. Tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan berupa sanksi baik administrasi maupun *pro justicia* membuat kesadaran pelaku usaha semakin meningkat terkait pentingnya pemenuhan standar cara distribusi yang baik.

Beberapa standar cara distribusi yang baik seperti CRPB (Cara Ritel Pangan Olahan Yang Baik), CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik), GDP (Good Distribution Practice), dan lain-lain. Dalam rangka meningkatkan literasi pelaku usaha terhadap regulasi, BBPOM di Bandar Lampung secara aktif melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha.

(6) Indeks Pelayanan Publik

Tabel 1.21 Capaian Kinerja Indikator Indeks Pelayanan Publik Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	3,51	4,17	118,80
2021	4,35	4,50	103,45
2022	4,45	4,46	100,22
2023	4,40	4,78	108,64
2024	4,85	4,87	100,41

Berdasarkan data mengenai Indeks Pelayanan Publik pada BBPPOM di Bandar Lampung untuk tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024, kita dapat melakukan analisis terhadap perkembangan dan pencapaian dari indikator pelayanan publik ini. Secara keseluruhan, terlihat adanya kenaikan yang konsisten dalam nilai Indeks Pelayanan Publik setiap tahun. Pada tahun 2020, nilai indeks tercatat sebesar 4,17, yang kemudian meningkat menjadi 4,50 pada tahun 2021. Meskipun pada tahun 2022 terjadi sedikit penurunan menjadi 4,46, namun trend positif kembali berlanjut dengan peningkatan signifikan pada tahun 2023 (4,78) dan 2024 (4,85). Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik di BBPPOM Bandar Lampung, dengan fokus pada perbaikan sistem, prosedur, atau strategi yang dijalankan untuk meningkatkan kepuasan publik. Proses evaluasi dan perbaikan di setiap tahun mungkin berperan penting dalam mendongkrak angka indeks ini. Meskipun ada tren positif secara umum, tahun 2022 mencatatkan sedikit penurunan nilai indeks, yaitu dari 4,50 (2021) menjadi 4,46 (2022). Penurunan kecil ini bisa disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti adanya hambatan dalam penerapan kebijakan atau perubahan eksternal yang mempengaruhi kualitas pelayanan. Misalnya, faktor seperti pandemi COVID-19, pengaruh regulasi baru, atau keterbatasan sumber daya bisa menjadi penyebab fluktuasi nilai indeks pada

tahun tersebut. Namun, penurunan ini tampaknya hanya bersifat sementara, karena pada tahun 2023 dan 2024, nilai indeks kembali meningkat, yang menandakan bahwa BBPPOM berhasil melakukan evaluasi dan perbaikan untuk mengatasi kendala yang ada pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, tercatat nilai indeks tertinggi dalam periode ini, yaitu 4,85. Hal ini menunjukkan bahwa BBPPOM Bandar Lampung berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik secara signifikan, bahkan mencapai hampir titik maksimal pada skala indeks. Ini bisa mencerminkan adanya peningkatan dalam aspek seperti kecepatan pelayanan, transparansi, kualitas komunikasi, serta aksesibilitas layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Pencapaian ini sangat positif dan mencerminkan upaya BBPPOM yang konsisten dalam meningkatkan standar pelayanan, serta kemampuan untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk mencapai hasil yang lebih baik. Jadi peningkatan indeks pelayanan publik BBPPOM Bandar Lampung dari tahun ke tahun menunjukkan progres yang signifikan dalam kualitas pelayanan. Meskipun ada penurunan kecil pada tahun 2022, secara keseluruhan kinerja BBPPOM dalam memberikan pelayanan publik terus membaik. Hal ini tercermin dari nilai indeks yang semakin mendekati angka sempurna pada 2024. Proses evaluasi, pembenahan sistem, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di BBPPOM menjadi faktor penting dalam pencapaian ini. Peningkatan pelayanan publik yang konsisten ini tentu akan memberikan dampak positif terhadap kepuasan masyarakat dan kepercayaan publik, yang pada gilirannya akan mendorong tercapainya tujuan strategis organisasi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memberikan pelayanan yang optimal di masa depan.

(7) Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Tabel 1.22 Capaian Kinerja Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi Tahun 2022-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	Indikator dimulai pada tahun 2022		
2021			
2022	77,00	97,29	126,35

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2023	79,00	100,00	126,58
2024	100,00	100	100,00

Pada tahun 2020 dan 2021 belum diperoleh realisasi dan capaian untuk penilaian kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dikarenakan indikator baru berlaku pada tahun 2022. Pada tahun 2022 dan 2023, capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik sebesar 126,35% dan 126,58% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**. Faktor-faktor penyebab capaian ini adalah:

1. Adanya tahapan seleksi calon UMKM yang akan didampingi melalui kriteria sesuai Juknis Pendampingan sehingga UMKM yang terpilih dinilai layak dan memiliki komitmen untuk mengikuti program pendampingan.
2. Adanya antusiasme dan kesadaran UMKM pangan olahan, OT, dan kosmetik untuk mendapatkan izin edar BPOM melalui program pendampingan.
3. Kompetensi fasilitator internal maupun eksternal dalam melakukan pendampingan kepada UMKM berupa bimbingan dalam penyiapan dokumen maupun sarana prasarana
4. Dukungan lintas sektor seperti Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kelautan dan Perikanan, PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu), Pusat Inkubator Bisnis Politeknik Negeri Lampung, Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) dan Rumah UMKM Lampung Tengah berupa usulan data UMKM dibawah binaan dinas/instansi/organisasi terkait atau penyediaan fasilitas/sarana/prasarana bagi UMKM
5. Komitmen UMKM Pangan Olahan untuk bersedia mengikuti program pendampingan sampai dengan selesai melalui ditandatanganinya surat pernyataan komitmen.
6. Adanya panduan / juknis pelaksanaan program pendampingan Pangan Olahan sebagai pedoman bagi petugas dalam melaksanakan program pendampingan sehingga monitoring dan evaluasi dapat terukur. Namun juknis ini belum tersedia untuk program pendampingan OT dan Kosmetika di tahun 2022 dan 2023

- Monitoring dan evaluasi rutin baik oleh BBPOM di Bandar Lampung maupun Direktorat pengampu untuk memantau progress maupun kendala-kendala selama proses pendampingan Pangan Olahan, OT, dan Kosmetika
- Komunikasi efektif antara UMKM dan fasilitator internal dan eksternal melalui WAG maupun konsultasi secara langsung
- Peningkatan pemahaman dan wawasan UMKM Pangan Olahan, OT, dan Kosmetik tentang standar sarana produksi yang baik melalui bimbingan teknis, sosialisasi, dan konsultasi baik secara luring maupun daring.

Dengan melihat tren realisasi sepanjang 2 tahun terakhir yang cenderung meningkat yaitu sebesar 97,29% dan 100% dan sudah melampaui target 2024 sebesar 81%, maka dikhawatirkan capaian kinerja 2024 juga akan melebihi 120%. Berdasarkan trend realisasi tersebut maka BBPOM di Bandar Lampung melakukan review dan usulan terhadap target indikator 2024 sehingga ditetapkan target indikator baru sebesar 100%. Hal tersebut sejalan dengan rekomendasi Kemenpan RB dimana penetapan target kinerja harus memperhitungkan realisasi kinerja tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 diperoleh persentase realisasi penilaian kinerja 100% dengan capaian sebesar 100% dengan kriteria **Baik**.

(8) Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota

Tabel 1.23 Capaian Kinerja Indikator Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	Indikator dimulai pada tahun 2024		
2021			
2022			
2023			
2024	95,00	92,77	97,65

Capaian indikator ini belum bisa dibandingkan terhadap tahun sebelumnya karena merupakan indikator baru di tahun 2024. Tidak optimalnya koordinasi Tim Pembinaan pengawasan obat dan makanan (TKPPOM) di tingkat provinsi dan di 9 (sembilan) kab/Kota terutama di kabupaten Pesisir Barat yang tidak menerima DAK.

5. Sasaran Kegiatan (SK5)

Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan sistem yang komprehensif agar BBPOM di Bandar Lampung mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BBPOM di Bandar Lampung, maka disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Bandar Lampung akan meningkatkan efektivitasnya apabila BBPOM di Bandar Lampung mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Capaian Sasaran Kegiatan diukur dengan indikator kinerja (1) Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan, (2) Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman, (3) Jumlah desa pangan aman, (4) Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.

Upaya meningkatkan Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah Kerja BBPOM di Bandar Lampung yaitu:

- a) Peningkatan inovasi ragam kegiatan KIE baik secara kuantitas dan kualitas untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan sekaligus membangun kesadaran masyarakat;
- b) Dilakukan review terhadap standar pelayanan pada setiap UPP 2 kali setahun serta mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 28 tahun 2022;
- c) Penerapan dan pelaksanaan inovasi Layanan publik yang baik secara optimal untuk mempertahankan predikat sebagai UPP dengan Pelayanan Prima.

Capaian dari SK5 selama kurun waktu 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.24 Nilai SK.5 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2020-2024

No.	Sasaran Kegiatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
SK5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	105,02	99,70	100,20	100,78	100,97

(1) Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Tabel 1.25 Capaian Kinerja Indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	86,62	93,17	107,56
2021	94,50	93,35	98,78
2022	95,90	95,06	99,12
2023	97,40	97,96	100,57
2024	98,80	99,56	100,77

Berdasarkan data yang disajikan, kita dapat menganalisis tingkat efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Bandar Lampung terkait obat dan makanan pada periode 2020 hingga 2024. Indikator yang digunakan adalah hasil survei terhadap tingkat persepsi masyarakat terhadap berbagai sumber informasi KIE yang diberikan, yang mencakup media cetak, media elektronik, media sosial, serta pendekatan langsung ke masyarakat. Tren Peningkatan Nilai Efektivitas KIE Dari nilai yang tercatat, terlihat adanya peningkatan yang signifikan pada efektivitas KIE setiap tahunnya

Peningkatan ini mencerminkan perbaikan berkelanjutan dalam kualitas dan jangkauan program KIE yang dilaksanakan oleh Badan POM. Peningkatan tersebut mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain Peningkatan kualitas konten dalam setiap materi KIE yang disampaikan ke masyarakat.

Pemanfaatan media sosial yang semakin optimal untuk menjangkau lebih banyak masyarakat. Pengembangan dan penyesuaian metode komunikasi, seperti melibatkan lebih banyak interaksi langsung dengan masyarakat, serta mengadaptasi format yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum. Seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan dalam pola konsumsi informasi masyarakat, Badan POM tampaknya semakin mampu menyesuaikan diri dalam memberikan edukasi tentang obat dan makanan yang aman dan berkualitas.

Peningkatan efektivitas KIE dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya keberhasilan dalam usaha Badan POM untuk lebih memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat mengenai keamanan obat dan makanan. Hal ini mencerminkan upaya Badan POM yang semakin kuat dalam menjalankan fungsinya, baik melalui media tradisional, media sosial, maupun interaksi langsung. Namun di tahun 2021 dan 2022 terlihat Nilai Efektifitas KIE belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan ada nya kendala Covid-19 dan hal hal lainnya yang mempengaruhi terhadap anggaran.

(2) Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman

Tabel 1.26 Capaian Kinerja Indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	16	18	112,50
2021	40	40	100,00
2022	59	60	101,69
2023	78	80	102,56
2024	97	100	103,09

Terdapat capaian realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman pada tahun 2020, 2022, 2023 dan 2024 dibandingkan target akumulasi tiap tahunnya. Sedangkan target tercapai 100% pada tahun 2023. Target indikator sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman ditetapkan secara kumulatif hingga tahun 2024.

(3) Jumlah desa pangan aman

Tabel 1.27 Capaian Kinerja Indikator Jumlah desa pangan aman Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	7	7	100,00
2021	16	16	100,00
2022	25	25	100,00
2023	33	33	100,00
2024	42	42	100,00

Realisasi pada tahun 2024 dengan realisasi sebesar 42 desa telah mencapai target sehingga target kumulatif yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu 42 desa dapat tercapai. Terjadinya pandemi covid-19 sejak tahun 2020 menyebabkan perubahan skalaprioritas oleh pemerintah. Dalam menangani pandemi covid19 pemerintah melakukan refocusing anggaran dalam menangani covid-19 sehingga terkait hal tersebut maka terjadi pula penyesuaian target pada tahun 2020. Setelah adanya perubahan APBNP 2020 yang ditujukan untuk mengatasi penyebaran covid-19, maka target jumlah desa pangan aman tahun 2020 mengalami penyesuaian dari 9 desa menjadi 7 desa. Kemudian selisih 2 desa tersebut dimasukkan dalam target tahun 2021 sehingga menjadi 9 desa yang diintervensi selama tahun 2021. Target indikator Jumlah Desa Pangan Aman pada tahun 2022 sebesar 25 desa, tahun 2023 sebesar 33 dan tahun 2024 sebesar 42 desa. Progress realisasi kegiatan Desa Pangan Aman pada tahun 2024 ini merupakan kumulatif pembobotan tahapan kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan, sedangkan target akhir tahun periode Renstra merupakan target jumlah desa yang telah diintervensi sejak tahun 2020. Setiap tahapan dalam Program Prioritas Nasional Desa Pangan Aman BBPOM Bandar Lampung Tahun 2024 telah selesai 100% (42 desa) dan telah dilakukan pengawalan program keamanan desa pangan aman yang telah diintervensi dari tahun 2020-2024.

(4) Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.

Tabel 1.28 Capaian Kinerja Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	2	2	100,00
2021	4	4	100,00
2022	7	7	100,00
2023	10	10	100,00
2024	13	13	100,00

Berdasarkan tabel di atas, semua realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas 2020 hingga tahun 2024 telah tercapai sesuai target. Target inidikator ini memang ditetapkan secara kumulatif hingga tahun 2024.

6. Sasaran Kegiatan (SS6)

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung

Peningkatan Efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan dilakukan melalui pemeriksaan penandaan label sesuai dengan ketentuan dan pengujian produk berdasarkan parameter kritis. Capaian Sasaran Kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- (1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
- (2) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.

Upaya dalam peningkatan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi petugas penandaan label dan pengujian, pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL) pengujian, pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium serta pengembangan metode analisa yang cepat dalam proses pengujian serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait kendala dan permasalahan dalam sampling dan pengujian. Capaian dari SK6 selama kurun waktu 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.29 Nilai SK6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2020-2024

No.	Sasaran Kegiatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
SK6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	106,73	91,21	99,95	120	120

(1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Tabel 1.30 Capaian Kinerja Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	85,00	91,28	107,39
2021	100,00	90,74	90,74
2022	100,00	99,90	99,90
2023	100,00	100	100,00
2024	100,00	100	100,00

Realisasi pemenuhan persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada kurun waktu tahun 2020 - 2024 cenderung mengalami peningkatan. Pada kurun waktu tersebut hanya realisasi tahun 2021 yang mengalami sedikit penurunan, namun melesat naik secara signifikan pada tahun 2022. Realisasi kinerja tahun 2020 lebih tinggi daripada target yang telah ditetapkan, sehingga capaian kinerja lebih dari 100%. Pada tahun 2021 target meningkat menjadi 100% dari sebelumnya 85% di tahun 2020. Realisasi tahun 2021 yang hanya 90,74% berada di bawah target sehingga capaian kinerja tampak menurun. Penurunan kinerja tahun 2021 disebabkan belum terpenuhinya baku pembanding dan alat laboratorium untuk beberapa parameter uji kritis dan adanya keterlambatan pengadaan reagen dan media mikrobiologi di tengah pandemi Covid-19 pada tahun tersebut. Pada tahun 2022 target masih belum tercapai namun sudah ada peningkatan realisasi

menjadi 99,90%. Hal ini menunjukkan komitmen BBPOM di Bandar Lampung dalam meningkatkan kinerjanya. Pada tahun 2023 dan 2024 BBPOM di bandar Lampung telah berhasil mencapai target dan mempertahankannya, sehingga diperoleh capaian 100%.

(2) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.

Tabel 1.31 Capaian Kinerja Indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	86,00	91,19	106,03
2021	100,00	91,68	91,68
2022	100,00	100,00	100,00
2023	100,00	100,00	100,00
2024	100,00	100,00	100,00

Realisasi pemenuhan persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar mengalami peningkatan pada kurun waktu tahun 2020-2024. Hal ini menunjukkan komitmen BBPOM di Bandar Lampung dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya. Pada tahun 2021 target meningkat menjadi 100% dari sebelumnya 86% di tahun 2020. Hal ini mengakibatkan capaian kinerja tahun 2021 tampak menurun, meskipun realisasinya meningkat. Sejak tahun 2022 hingga 2024 BBPOM di Bandar Lampung memenuhi seluruh indikator pemeriksaan dan pengujian sesuai standar sehingga realisasi dan capaian kinerja tercapai 100%.

7. Sasaran Kegiatan (SK7)

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung

Peredaran sediaan farmasi ilegal secara daring di provinsi Lampung, seperti halnya di banyak daerah lain di Indonesia, merupakan masalah yang cukup serius. Sediaan farmasi terutama produk kosmetik, dan obat yang diperjualbelikan secara ilegal ini sering kali tidak terjamin keamanannya, sehingga berisiko bagi kesehatan penggunaanya. Selain itu, peredaran sediaan farmasi ilegal ini juga melanggar hukum dan dapat di pidana sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Beberapa alasan mengapa peredaran sediaan farmasi ilegal secara daring marak adalah:

- Akses yang mudah dengan berkembangnya teknologi informasi dan banyaknya platform *e-commerce*, sehingga banyak pelaku usaha yang memanfaatkan penjualan secara daring melalui platform *e-commerce* menawarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi ketentuan.
- Pengawasan terhadap jual beli obat secara daring masih terbatas, baik dari pihak berwenang maupun dari pihak penyedia platform *online*. Hal ini membuka celah bagi pelaku ilegal untuk beroperasi, dengan menyamarkan dirinya.
- Beberapa konsumen tertarik membeli sediaan farmasi secara daring dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan membeli di sarana resmi. Hal Ini menjadi faktor pendorong maraknya transaksi sediaan farmasi yang tidak memenuhi ketentuan secara daring.

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi tindak kejahatan mencakup berbagai pendekatan yang melibatkan penegak hukum lainnya, pencegahan, dan kerja sama berbagai pihak. Beberapa langkah penindakan yang telah diambil untuk mengurangi tindak kejahatan antara lain:

- Penegakkan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang profesional. Hal ini memastikan bahwa pelaku kejahatan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum yaitu dengan memberikan pelatihan kepada PPNS BBPOM di Bandar Lampung untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani kasus-kasus kejahatan dengan cara efektif dan efisien.
- Kolaborasi antara aparat penegak hukum yaitu dengan meningkatkan kerja sama dengan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam menangani kasus kejahatan. Bentuk nyata dari kerjasama tersebut antara lain audiensi antara kepala BBPOM di Bandar Lampung dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, audiensi antara Kepala BBPOM di Bandar Lampung dengan Dirreskrimsus Polda Lampung, sharing session dengan Kasie Narkoba Kejaksaan Tinggi Lampung dan penyidik terus meningkatkan koordinasi dengan Korwas Polda Lampung dalam hal penanganan perkara.
- Pemanfaatan teknologi untuk memperbaiki sistem pengawasan dan pelaporan kejahatan Obat dan Makanan seperti aplikasi ADP *dashboard*

penindakan dan *inawebcrawler* merupakan alat yang dapat mendukung petugas penindakan dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran Obat dan Makanan. Kedua aplikasi ini memberikan kemudahan dalam mendeteksi dan mengidentifikasi potensi masalah yang berkaitan dengan Obat dan Makanan. Hal ini dapat mendukung upaya penindakan kejahatan dan pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh produsen atau distributor. Kedua aplikasi ini dapat membantu PPNS BBPOM di Bandar Lampung dalam menyusun laporan yang lebih akurat, yang kemudian bisa digunakan sebagai dasar hukum untuk melakukan penindakan terhadap pihak-pihak yang melanggar aturan, baik itu dengan cara takedown terhadap akun-akun pada marketplace daring yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi ketentuan keamanan, kemanfaatan dan mutu yaitu kolaborasi Badan POM dengan Kementerian Kominfo.

Keberhasilan penindakan untuk mencapai Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja utama (IKU) (1) Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan dengan target 81,0% yang telah ditetapkan tercapai pada akhir tahun 2024. IKU ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai efektivitas dan efisiensi dari upaya penindakan BBPOM di Bandar Lampung dalam mengawasi dan menegakkan regulasi terkait Obat dan Makanan. IKU mencakup berbagai aspek yang mencerminkan pencapaian Sasaran Kegiatan yang lebih besar, baik dalam hal kuantitatif maupun kualitatif. Capaian dari SK6 selama kurun waktu 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.32 Nilai SK7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2020-2024

No.	Sasaran Kegiatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
SK7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	120	119,44	120	94,70	120

Tabel 1.33 Capaian Kinerja Indikator keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	39,00	55,43	142,12
2021	69,00	82,42	119,44
2022	73,00	96,25	131,84
2023	77,00	72,92	94,70
2024	81,00	100	123,46

Realisasi kinerja keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan BBPOM di Bandar Lampung pada tahun 2020-2024 selalu naik kecuali pada tahun 2023 mengalami penurunan, hal ini disebabkan adanya kendala dalam proses penyelesaian perkara yaitu penyidik kesulitan dalam memenuhi petunjuk Jaksa (P.19). Dimana petunjuk Jaksa berupa pemenuhan alat bukti elektronik tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama karena melibatkan institusi lain yang memiliki otoritas seperti rekening koran bank dan rekaman percakapan telepon serta chat Whatsapp. Sedangkan capaian kinerja keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan BBPOM di Bandar Lampung fluktuasi, yaitu pada tahun 2021 mengalami penurunan yang disebabkan adanya perbedaan target yang besar pada tahun 2020 dengan tahun 2021 yaitu dari target 39 dengan 69. Hal ini disebabkan capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 142,12% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan, sedangkan pada tahun 2021 capaian kinerja sebesar 119,44% dengan kriteria Sangat Baik (meskipun ada penurunan capaian kinerja dari tahun 2020). Sedangkan capaian kinerja pada tahun 2022 dan 2024 sebesar 131,84% dan 123,46% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan, sehingga target pada tahun 2025 dinaikkan menjadi 85 agar capaian kinerja tidak melebihi 120%. Secara umum capaian kinerja keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan BBPOM di Bandar Lampung tercapai bahkan melebihi target, hanya pada tahun 2023 mengalami penurunan karena dipengaruhi faktor internal dan eksternal.

Terdapat kesalahan perhitungan pada realisasi kinerja pada tahun 2021 dimana semula adalah 166,72% dengan capaian kinerja 241,62% kemudian

realisasi kinerja menjadi 82,42% dengan capaian kinerja 119,44% dan telah disesuaikan juga pada matrix analisis tren dan ketercapaian tujuan.

8. Sasaran Kegiatan (SK8)

Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Bandar Lampung yang optimal

Untuk melaksanakan tugas BBPOM di Bandar Lampung, diperlukan penguatan organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Bandar Lampung. Capaian dari SK8 selama kurun waktu 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.34 Nilai SK8 Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandar Lampung yang optimal Tahun 2020-2024

No.	Sasaran Kegiatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
SK8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandar Lampung yang optimal	93,65	99	102,57	101,97	99,65

Sasaran Kegiatan ini diukur dengan menggunakan indikator:

(1) Nilai RB BBPOM di Bandar Lampung

Berdasarkan PermenPANRB No 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Pada tahun 2021 Balai Besar POM di Bandar telah meraih WBK. Balai Besar POM di Bandar Lampung terus melakukan upaya peningkatan untuk meraih

WBBM, namun pada tahun 2022 dan 2023 masih ada persyaratan yang belum terpenuhi.

Tabel 1.35 Capaian Kinerja Indikator Nilai RB BBPOM di Bandar Lampung
Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	85,00	79,80	93,88
2021	83,50	83,46	99,95
2022	86,00	91,00	105,81
2023	88,50	90,37	102,11
2024	91,37	87,38	95,63

Capaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi BBPOM di Bandar Lampung selama kurun waktu lima tahun terakhir periode renstra tidak menunjukkan garis linier (fluktuatif) yaitu tahun 2020 sampai dengan 2022 capaian kinerja naik, selanjutnya pada tahun 2022 sampai dengan 2024 capaian kinerja menurun. Pada capaian tahun 2020 dan tahun 2021 dengan capaian masih cukup. Pada tahun 2022 dan 2023 dengan capaian kinerja sangat baik, selanjutnya pada tahun 2024 mengalami penurunan dan bernilai cukup. Hal ini disebabkan pemenuhan dokumen dan persyaratan pembangunan ZI sebagai data dukung RB belum optimal.

(2) Nilai AKIP BBPOM di Bandar Lampung

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta

PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain:

- (1) Perencanaan Kinerja,
- (2) Pengukuran Kinerja,

- (3) Pelaporan Kinerja,
- (4) Evaluasi AKIP dan
- (5) Capaian Kinerja.

Berdasarkan hasil penilaian selama kurun waktu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 Balai Besar POM di Bandar Lampung mendapatkan predikat BB (Sangat Baik) dan berdasarkan penilaian angka menunjukkan trend peningkatan.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK8 yaitu:

- a) Memastikan Rencana Aksi RB relevan dan cukup untuk mencapai target Sasaran Kegiatan Utama;
- b) Monev Rencana Aksi pengelolaan pengaduan dan melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan pengaduan kepada masyarakat;
- c) Memastikan rencana aksi RB Tematik telah logis untuk mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik instansi Pemerintah;
- d) Menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat Badan POM;
- e) Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran setiap bulan
- f) Memberikan reward dan punishment terhadap capaian kinerja baik individu maupun substansi.

Tabel 1.36 Capaian Kinerja Indikator Nilai AKIP BBPOM di Bandar Lampung
Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	80,00	74,74	93,43
2021	75,70	74,22	98,04
2022	76,70	76,19	99,34
2023	77,70	79,12	101,83
2024	80,50	80,58	100,10

Capaian indikator nilai AKIP BBPOM di Bandar Lampung selama kurun waktu lima tahun terakhir periode renstra menunjukkan garis linier (meningkat) yaitu tahun 2020 sampai dengan 2022 dengan capaian kinerja cukup, selanjutnya pada tahun 2023 sampai dengan 2024 capaian kinerja sangat baik. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan komitmen dalam mewujudkan

pemerintahan yang bersih, transparan serta peningkatan layanan publik kepada masyarakat.

(3) Nilai Pengelolaan Kearsipan

Tabel 1.37 Capaian Kinerja Indikator Nilai Pengelolaan Arsip Tahun 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	Indikator dimulai pada tahun 2024		
2021			
2022			
2023			
2024	88,07	90,9	103,21

Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 belum diperoleh realisasi dan capaian untuk penilaian kinerja Pengelolaan Kearsipan dikarenakan indikator baru berlaku pada tahun 2024. Capaian nilai pengelolaan kearsipan BBPOM di Bandar Lampung pada tahun 2024 sebesar 103,21 dengan kriteria sangat baik. Keberhasilan capaian ini disebabkan antara lain penerapan ketentuan dalam pengelolaan kearsipan, pemenuhan secara bertahap sarana dan prasarana kearsipan dan pengembangan kompetensi petugas kearsipan melalui pelatihan/bimbingan teknis

9. Sasaran Kegiatan (SK9)

Terwujudnya SDM BBPOM di Bandar Lampung yang berkinerja optimal

Pengelolaan kepegawaian memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Untuk mengukur Sasaran Kegiatan ini digunakan indikator (1) Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar PPOM di Bandar Lampung. Capaian dari SK9 selama kurun waktu 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.38 Nilai SK9 Terwujudnya SDM BBPOM di Bandar Lampung yang berkinerja optimal Tahun 2020-2024

No.	Sasaran Kegiatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
SK9	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandar Lampung yang berkinerja optimal	103,33	107,90	107,87	114,43	96,71

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- 1) Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai,
- 2) Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan,
- 3) Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS,
- 4) Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuan hukuman disiplin yang pernah dialami.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK9 yaitu:

- a) Memberikan kesempatan kepada pegawai BBPOM untuk mengikuti pengembangan kompetensi melalui pendidikan formal ke arah jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
- b) Menyusun perencanaan pengembangan kompetensi melalui pelatihan mandiri BBPOM di Bandar Lampung;
- c) Melakukan penilaian SKP dan memberikan pembinaan kepada pegawai
- d) Menegakkan disiplin pegawai

Tabel 1.39 Capaian Kinerja Indikator Nilai IPASN BBPOM di Bandar Lampung
Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	75,00	77,50	103,33
2021	77,00	83,08	107,90
2022	78,00	84,14	107,87
2023	79,00	88,03	111,43
2024	90,66	87,68	96,71

Capaian indikator nilai IPASN BBPOM di Bandar Lampung selama kurun waktu lima tahun terakhir periode renstra menunjukkan fluktuatif yaitu tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan capaian kinerja sangat baik, selanjutnya pada tahun 2024 capaian kinerja menurun dengan kriteria cukup. Hal ini disebabkan Adanya perubahan instrument pengukuran IP ASN dari BKN yaitu adanya perubahan instrument bobot dasar dimensi kompetensi yang tidak hanya meliputi riwayat pengembangan kompetensi, namun juga termasuk konversi hasil penilaian kinerja.

10.Sasaran Kegiatan (SK10)

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Capaian dari SK10 selama kurun waktu 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.40 Nilai SK10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan Tahun 2020-2024

No.	Sasaran Kegiatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
SK10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	92,49	78,41	111,92	116	111,61

Sasaran Kegiatan ini diukur melalui indikator berikut:

(1) Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Pemenuhan terhadap standar *Good Laboratory Practice* (GLP) adalah upaya perkuatan laboratorium pengujian UPT untuk memenuhi Standar GLP/ Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Standar Ruang Lingkup > 65,
- 2) Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
- 3) Standar Alat Laboratorium > 70

Pada tahun 2024, nilai Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) BBPOM di Bandar Lampung adalah 87.22% dengan rincian persentase pemenuhan SRL 95,42%, persentase pemenuhan standar kompetensi 94,33% dan persentase pemenuhan standar peralatan 71,91%. Nilai ini telah memenuhi target tahunan yaitu 84.50% sehingga diperoleh persentase capaian 103.22%.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target tersebut sebagai berikut:

- a) Laboratorium telah menyusun perencanaan yang digunakan sebagai acuan dalam pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium yang mencakup perencanaan pemenuhan komponen Standar Ruang Lingkup,
- b) pemenuhan komponen Standar Kompetensi dan pemenuhan Standar Peralatan.
- c) Target pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium tahunan telah dibagi menjadi target per TW sehingga pengawalan terhadap pemenuhan capaiannya dapat lebih ketat.
- d) Monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan yang telah dibuat dilakukan secara berkala dengan batas waktu tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya
- e) Terdapat penugasan PIC untuk masing-masing komponen Standar Kemampuan Laboratorium sehingga diharapkan dapat lebih terkawal

- f) Penambahan ruang lingkup pengujian dilaksanakan secara bertahap oleh masing-masing laboratorium disesuaikan dengan ketersediaan alat, baku pembanding dan zat aktif dalam sediaan yang diuji.
- g) Pengembangan kompetensi personil dilaksanakan melalui keikutsertaan pada kegiatan terpadu Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional maupun kegiatan mandiri yang diadakan di BBPOM di Bandar Lampung.

Tabel 1.41 Capaian Kinerja Indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	85,00	67,70	79,65
2021	73,00	73,41	100,56
2022	78,00	81,00	103,85
2023	83,00	82,78	99,73
2024	84,50	87,22	103,22

Capaian kinerja pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan makanan sesuai standar GLP berfluktuatif pada tahun 2020 - 2024. Namun demikian, realisasi kinerja pada tahun 2020 - 2024 terus meningkat. Hal ini menggambarkan bahwa upaya peningkatan kemampuan laboratorium BBPOM di Bandar Lampung dari tahun ke tahun terbukti efektif. Nilai capaian yang berfluktuatif disebabkan adanya perubahan target yang juga berfluktuatif. Target tahun 2021 menurun dibandingkan tahun 2020, kemudian meningkat pada tahun 2022, 2023, dan 2024. Namun target tahun 2024 tidak lebih tinggi dari target tahun 2020. Perubahan target disebabkan oleh perubahan formulasi perhitungan nilai standar kemampuan laboratorium dengan mengikuti kebijakan regionalisasi laboratorium pada tahun berjalan.

(2) Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandar Lampung yang optimal

Lingkungan IT yang lebih dinamis dari sebelumnya membuat instansi terus membutuhkan teknologi yang dapat lebih terdistribusi dan lebih baik dari sebelumnya. Saat ini, berbagai instansi membutuhkan pengelolaan data dan informasi, karena pengelolaan data dan informasi yang tidak memadai dapat

secara langsung mempengaruhi proses bisnis, merusak citra sebuah brand, atau layanan publik mengalami masalah karena pelanggan akan merasa kesulitan memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan.

Untuk menghindari masalah yang terjadi karena kurangnya tata kelola data dan informasi, perlu adanya pengelolaan terhadap data dan informasi yang ada, memastikan pengelolaan yang digunakan sebagai mendukung lancarnya operasional bisnis memenuhi standarisasi kinerja dan fungsinya bekerja secara optimal. Mengetahui di mana letak kekurangan, menemukan, mengisolasi, dan menyelesaikan masalah yang berpotensi menyebabkan dampak negatif terhadap proses bisnis.

Indeks pengelolaan data dan informasi merupakan alat untuk mengelola data dan informasi yang terdiri dari Indeks pemanfaatan sistem informasi dan Indeks data dan informasi yang dimutakhirkan. Sistem informasi yang menjadi acuan indeks adalah *sharing folder*, berita aktual, email dan *dashboard* BCC dan data yang harus selalu mutakhir adalah data Sistem Informasi Pelaporan Terpadu dan Sistem pelaporan informasi masyarakat keracunan.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai indeks pengelolaan data dan informasi optimal diperlukan pendekatan strategis yang mencakup sosialisasi, pelatihan, dukungan teknis, serta insentif yang mendorong keterlibatan. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu:

a) Sosialisasi yang Efektif

- Komunikasikan Manfaat

Jelaskan bagaimana sistem informasi dapat membantu pegawai dalam pekerjaan mereka, seperti menghemat waktu, meningkatkan efisiensi, atau mempermudah kolaborasi.

- Gunakan Media yang Tepat

Gunakan berbagai saluran komunikasi (email, forum internal, poster, atau sesi *town hall*) untuk memperkenalkan sistem dan fiturnya.

b) Pelatihan dan Peningkatan Keterampilan

- Pelatihan Praktis

Adakan pelatihan *hands-on* untuk membantu pegawai memahami cara kerja sistem dan bagaimana menerapkannya dalam tugas sehari-hari.

- Materi Edukasi Digital

Sediakan panduan berupa video tutorial, manual pengguna, atau FAQ yang mudah diakses kapan saja.

- Pendampingan Awal

Siapkan tim pendamping untuk membantu pegawai selama masa transisi ke sistem baru.

c) Pengalaman Pengguna yang Baik

- Desain *User-Friendly*

Pastikan antarmuka sistem mudah digunakan, dengan navigasi intuitif dan fitur yang relevan.

- Minimalkan Hambatan Teknis

Lakukan uji coba untuk mengidentifikasi dan mengatasi bug atau masalah teknis sebelum sistem diluncurkan.

d) Dukungan teknis yang responsif

- Tim Dukungan Khusus

Sediakan tim IT atau helpdesk yang dapat membantu pegawai jika mereka menghadapi kendala.

- Layanan 24/7 (jika diperlukan)

Untuk organisasi yang bekerja di luar jam reguler, pastikan dukungan teknis tersedia kapan saja.

e) Kebijakan

- Integrasi dalam SOP

Jadikan penggunaan sistem informasi bagian dari prosedur operasional standar (SOP) organisasi.

f) Pemantauan dan Efisiensi

- Monitoring Penggunaan

Lakukan evaluasi rutin untuk melihat tingkat pemanfaatan sistem informasi. Gunakan data ini untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi pegawai.

- *Feedback* Pegawai

Libatkan pegawai dalam proses evaluasi dengan meminta masukan mereka

tentang sistem, kemudian gunakan masukan tersebut untuk melakukan perbaikan.

g) Budaya kerja berbasis teknologi

- **Pemimpin Sebagai Contoh**

Dorong para pemimpin dan manajer untuk menjadi pengguna aktif sistem, sehingga dapat menjadi teladan bagi pegawai lainnya.

- **Kampanye "Go Digital"**

Jalankan program atau kampanye internal untuk membangun kesadaran dan semangat dalam memanfaatkan teknologi.

Tabel 1.42 Capaian Kinerja Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandar Lampung yang optimal Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	1,50	1,58	105,33
2021	2,00	1,125	56,25
2022	2,25	2,90	128,89
2023	2,50	2,90	116,00
2024	3,00	3,00	100,00

11. Sasaran Kegiatan (SK11)

Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandar Lampung secara Akuntabel

Di lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dalam rangka menjalankan roda aktivitas proses bisnis instansi dan dituntut akuntabilitas dalam pemanfaatannya. Oleh karena itu, Sasaran Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur kemampuan BBPOM di Bandar Lampung dalam mengelola anggaran secara tepat dan akuntabel. Sasaran Kegiatan ini diukur menggunakan 4 (satu) indikator yaitu: (1) Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandar Lampung, (2) Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa, (3) Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara, (4) Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri.

Capaian dari SK11 selama kurun waktu 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.43 Nilai SK11 Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandar Lampung secara Akuntabel Tahun 2020-2024

No.	Sasaran Kegiatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
SK11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandar Lampung secara Akuntabel	102,92	106,87	98,22	96,99	111,91

(1) Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandar Lampung

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai kinerja anggaran yaitu:

- Melaksanakan revisi anggaran sesuai jadwal;
- Melakukan monitoring terhadap realisasi anggaran dan rencana penarikan dana;
- Melaksanakan belanja kontraktual sesuai dengan pedoman;
- Pengendalian terhadap penyelesaian tagihan dan pengelolaan UP dan TUP;
- Meningkatkan capaian kinerja (output dan program) dan melakukan efisiensi anggaran;
- Pelaporan kinerja melalui aplikasi SAKTI secara tepat waktu dengan data yang akurat.

Tabel 1.44 Capaian Kinerja Indikator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandar Lampung yang optimal Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	93,00	85,75	92,20
2021	90,00	90,09	100,10
2022	90,60	88,99	98,22
2023	91,80	89,04	96,99
2024	89,11	92,24	103,51

Capaian kinerja Nilai Kinerja anggaran menunjukkan fluktuatif pada tahun 2020 - 2024. Namun demikian, realisasi kinerja pada tahun 2020 - 2024 terus meningkat. Hal ini menggambarkan bahwa upaya peningkatan pengelolaan keuangan BBPOM di Bandar Lampung dari tahun ke tahun terbukti efektif.

Nilai capaian fluktuatif ini salah satunya disebabkan adanya perubahan parameter penilaian baik Evaluasi Kinerja anggaran (EKA) maupun Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan bobot antara EKA dan IKPA dalam perhitungan Nilai Kinerja anggaran.

(2) Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

Tabel 1.45 Capaian Kinerja Indikator Nilai Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Tahun 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	Indikator dimulai pada tahun 2024		
2021			
2022			
2023			
2024	87,53	100,00	114,25

Berdasarkan Surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.07.01.2.21.12.23.920 perihal Permintaan Penyusunan Dokumen PK dan RAPK Unit Kerja di Lingkungan BPOM Tahun 2024 bahwa terdapat Indikator Baru di Tahun 2024 yang berasal dari Direktif Penugasan sebelumnya di tahun 2023, maka Balai Besar POM di Bandar Lampung melakukan penyesuaian SK IKU Tahun 2024 dengan menambahkan Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2024. Target capaian untuk IKU tersebut mengacu pada Nota Dinas Kepala Biro Umum Nomor: PR.06.01.25.2523.12.23.1060 tanggal 8 Desember 2023 hal Penyampaian Data Reviu Target Indikator Direktif Penugasan Perjanjian Kinerja Unit Kerja Tahun 2024 dengan target Nilai Pengelolaan Barang dan Jasa BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2024 ditetapkan sebesar 87,53%. Namun karena IKU Nilai Pengelolaan Barang dan Jasa baru ditetapkan pada tahun 2024, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan terhadap capaian IKU tahun-tahun sebelumnya pada periode renstra 2020-2024.

(3) Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

Tabel 1.46 Capaian Kinerja Indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	Indikator dimulai pada tahun 2024		
2021			
2022			
2023			
2024	60,00	97,73	162,88

Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 belum diperoleh realisasi dan capaian untuk penilaian kinerja Pengelolaan Barang milik Negara dikarenakan indikator baru berlaku pada tahun 2024. Capaian nilai Pengelolaan Barang Milik Negara BBPOM di Bandar Lampung pada tahun 2024 sebesar 162,88 dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan. Keberhasilan capaian ini disebabkan antara lain adanya lelang barang yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2023 namun pelaksanaan dilakukan pada tahun 2024.

(4) Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri

Tabel 1.47 Capaian Kinerja Indikator Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri Tahun 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	Indikator dimulai pada tahun 2024		
2021			
2022			
2023			
2024	60,00	65,93	109,88

Berdasarkan Surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.07.01.2.21.12.23.920 perihal Permintaan Penyusunan Dokumen PK dan RAPK Unit Kerja di Lingkungan BPOM Tahun 2024 bahwa terdapat indikator baru di Tahun 2024 yang berasal

dari Direktif Penugasan sebelumnya di tahun 2023, maka Balai Besar POM di Bandar Lampung melakukan penyesuaian SK IKU Tahun 2024 dengan menambahkan Nilai Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2024. Target capaian untuk IKU tersebut mengacu pada Nota Dinas Kepala Biro Umum Nomor: PR.06.01.25.2523.12.23.1060 tanggal 8 Desember 2023 hal Penyampaian Data Reviu Target Indikator Direktif Penugasan Perjanjian Kinerja Unit Kerja Tahun 2024 dengan target Nilai Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2024 ditetapkan sebesar 60%. Namun karena IKU Nilai Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri baru ditetapkan pada tahun 2024, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan terhadap capaian IKU tahun-tahun sebelumnya pada periode renstra 2020-2024.

I.1.2 Aspirasi Stakeholder

Dalam menghadapi tantangan masa depan, BBPOM di Bandar Lampung memahami pentingnya upaya memperkuat pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk menjaga kesehatan masyarakat. Lingkungan strategis yang dinamis dipengaruhi oleh faktor global, teknologi baru, dan dinamika sosial ekonomi. Oleh karena itu, aspirasi dan masukan dari stakeholder dan masyarakat menjadi sangat penting. Hal ini tidak hanya membantu BBPOM di Bandar Lampung dalam mengidentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, tapi juga memungkinkan BBPOM di Bandar Lampung untuk merespons secara efektif dan efisien terhadap perubahan yang terjadi.

Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan merupakan tugas yang dinamis, sehingga diperlukan adaptasi dan inovasi secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan zaman. Dengan berlandaskan aspirasi masyarakat, BBPOM di Bandar Lampung dapat mengembangkan strategi yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu kesehatan, termasuk menangani masalah keamanan pangan olahan, mengatur peredaran Obat, pemantauan klaim kosmetika yang beredar dan memastikan ketersediaan sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat. Aspirasi dari stakeholder dan masyarakat juga membantu BBPOM di Bandar Lampung dalam memahami bagaimana perubahan lingkungan strategis, seperti perkembangan teknologi digital dan perubahan demografis dapat

mempengaruhi pola konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan. Hal ini penting agar BBPOM di Bandar Lampung dapat menyesuaikan kebijakan dan mekanisme pengawasan untuk tetap relevan dan efektif. Maka dari itu, BBPOM di Bandar Lampung mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penjangkaran aspirasi ini. Setiap masukan akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Rencana Strategis BBPOM di Bandar Lampung tahun 2025-2029. Bersama-sama, kita dapat memastikan bahwa pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di Provinsi Lampung tidak hanya memenuhi standar nasional, tapi juga menanggapi kebutuhan dan aspirasi masyarakat provinsi Lampung secara khusus.

Sebagai salah satu pilar pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, stakeholder dan masyarakat memiliki peran yang sangat penting sebagai subyek dan sasaran program pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Sistem pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan secara nasional bertujuan untuk menjamin masyarakat yang sehat dengan konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, berkhasiat dan berdaya saing. Dari sudut pandang lain, masyarakat juga memiliki peran yang sangat strategis dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dengan menjadi konsumen yang cerdas agar terhindar dari sediaan farmasi dan pangan olahan yang berbahaya bagi kesehatan. Terkait hal ini aspirasi masyarakat menjadi hal yang harus diperhatikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung dalam menyusun perencanaan program pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

Beberapa saran masukan yang sering muncul dalam Survei antara lain “Peningkatan Layanan Publik BPOM”, “Permudah UMKM”, “Sarana Prasarana Layanan”, “Koordinasi ke Pemda”, “KIE tentang Obat”, “KIE Kosmetik”, “Diskon biaya Pengujian”, “*Fast respon* layanan WA”, “Sampling sampai ke pelosok”, “kompetensi petugas yang sesuai” dan “Sosialisasi BPOM ke Masyarakat” dan lainnya. Seluruh saran dan masukan masyarakat juga telah diklusterisasi dan diperoleh data bahwa responden mayoritas memberikan masukan agar BPOM melakukan Pengawasan secara menyeluruh, sosialisasi komunikasi dan edukasi (KIE) dan pengawasan pangan.

Berdasarkan hasil klasterisasi saran diatas dapat disimpulkan beberapa aspirasi dan harapan masyarakat dalam peningkatan kinerja pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan antara lain:

1. BBPOM di Bandar Lampung melakukan pengawasan dan sampling secara lebih menyeluruh sampai di wilayah pelosok/perifer.
2. BBPOM di Bandar Lampung diharapkan dapat memberikan jaminan keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di masyarakat.
3. BBPOM di Bandar Lampung agar secara intensif memberikan sosialisasi, komunikasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat bukan hanya terkait pangan tetapi juga obat dan kosmetik.
4. Peningkatan Layanan Publik baik langsung maupun tidak serta perbaikan secara terus menerus untuk sarana dan prasarana di ruang layanan publik baik untuk kelompok normal maupun kelompok rentan.

I.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam menyusun Renstra BBPOM di Bandar Lampung 2025-2029, memahami potensi dan permasalahan yang dihadapi menjadi kunci dalam merancang strategi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak hanya berkualitas dan efektif, tapi juga responsif terhadap dinamika kesehatan global dan nasional. BPOM, sebagai institusi yang bertanggung jawab atas keamanan, efikasi, dan mutu produk kesehatan dan pangan di Indonesia, berada di garis depan dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan mengemban tanggung jawab besar dalam melindungi kesehatan publik. Tantangan ini termasuk mengatasi ancaman kesehatan yang muncul (*emerging diseases*), yang memerlukan kesiapsiagaan dan responsivitas sistem pengawasan yang tinggi. Masa depan pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan menuntut adaptasi dan inovasi yang responsif terhadap dinamika global, ancaman kesehatan yang berpotensi muncul dan perkembangan teknologi. Dengan mengidentifikasi potensi yang dapat dimaksimalkan dan permasalahan yang perlu diatasi, BBPOM di Bandar Lampung dapat merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan layanan publik dan memastikan implementasi pengawasan yang lebih berkualitas dan efektif. Rencana strategis ini akan menjadi panduan bagi BBPOM di Bandar Lampung dalam menghadapi tantangan masa depan, memperkuat sistem pengawasan, dan memenuhi

ekspektasi masyarakat terhadap akses produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, berkualitas, dan terjangkau.

Mengintegrasikan potensi dan menanggulangi permasalahan dalam konteks agenda pembangunan nasional menjadi prioritas dalam Rencana Strategis BBPOM di Bandar Lampung 2025-2029. Strategi yang diambil harus mampu menjawab kebutuhan layanan publik yang berkualitas dan mengantisipasi ancaman kesehatan yang akan muncul, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan. Melalui pendekatan yang holistik dan kolaboratif, BBPOM di Bandar Lampung diharapkan tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan, tetapi juga berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

Rencana strategis yang komprehensif dan adaptif akan membantu BBPOM di Bandar Lampung tidak hanya dalam menghadapi tantangan saat ini dan masa depan, tetapi juga dalam berkontribusi secara signifikan terhadap agenda pembangunan nasional, khususnya dalam memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan berkualitas, mendukung pencapaian Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera. Sebagai langkah strategis dalam penyusunan perencanaan lima tahun yang akan datang (2025-2029), BBPOM di Bandar Lampung memproyeksikan serangkaian potensi dan permasalahan melalui analisis SWOT. Melalui analisis ini, dapat diidentifikasi secara komprehensif kekuatan dan kelemahan internal BBPOM di Bandar Lampung, serta peluang dan ancaman eksternal yang berpengaruh, untuk merumuskan strategi yang akan memaksimalkan potensi dan mengatasi permasalahan dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk masyarakat.

1.2.1 Kekuatan (*Strength*)

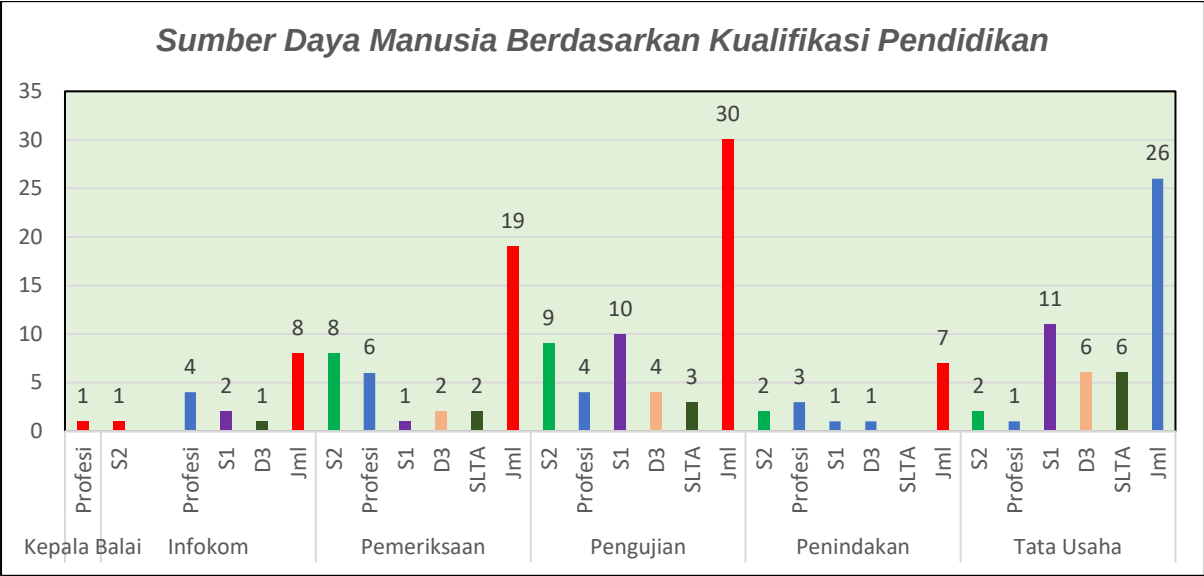
Analisis kondisi internal organisasi dengan tujuan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki BBPOM di Bandar Lampung, dapat membantu memahami dan mengevaluasi sumber daya, kapabilitas, dan aspek strategis yang memberikan BBPOM di Bandar Lampung keunggulan dalam menjalankan tugas pengawasannya. Identifikasi kekuatan ini tidak hanya vital dalam mempertahankan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, tetapi juga esensial dalam merencanakan pengembangan strategis yang akan memperkuat posisi BBPOM di Bandar Lampung di masa depan. Berikut ini

adalah kekuatan yang dimiliki oleh BBPOM di Bandar Lampung dalam menjalankan tugas dan fungsinya:

1. Kompetensi Pegawai BBPOM di Bandar Lampung Memadai

Pegawai BBPOM di Bandar Lampung memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang mumpuni, sehingga mampu menjalankan tugas pengawasan dengan efektif dan profesional. Kompetensi ini menjadi dasar utama dalam menjamin kualitas pelayanan publik dan penegakan regulasi yang akuntabel.

BBPOM di Bandar Lampung memiliki jumlah pegawai sebanyak 91 orang terdiri dari 34 laki-laki (37,36%) dan 57 perempuan (62,64%) dengan kualifikasi Pendidikan sebagai berikut: S-2 sebanyak 23 pegawai, Profesi sebanyak 19 pegawai, S-1 sebanyak 24 pegawai, D-3 sebanyak 14 pegawai dan SLTA sebanyak 11 pegawai (Gambar 1.3).



Gambar 1.3 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Kompetensi pegawai BBPOM di Bandar Lampung senantiasa ditingkatkan melalui program pengembangan kompetensi yang disusun dalam Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK) dan dimonitor pemenuhannya.

2. Pemanfaatan Anggaran yang Akuntabel

Pengelolaan akuntabilitas anggaran merupakan salah satu kekuatan utama yang dimiliki BBPOM di Bandar Lampung dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Anggaran yang dikelola secara akuntabel memungkinkan BBPOM di Bandar Lampung untuk melaksanakan berbagai program pengawasan,

pembinaan, serta penegakan hukum secara optimal dibuktikan dengan capaian nilai AKIP pada tahun 2024 sebesar 80,58 dengan predikat A (Sangat Baik).

Transparansi dalam pengelolaan anggaran menjadi aspek penting yang mendukung akuntabilitas lembaga ini. Pengelolaan anggaran yang terbuka melalui publikasi pada subsite <https://lampung.go.id> , ESR Menpan, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dapat diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan. Hal ini memberikan kepercayaan kepada stakeholder, baik internal maupun eksternal, bahwa BBPOM bekerja dengan integritas tinggi dalam mendukung keamanan dan mutu obat serta makanan.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi yang Memadai

Pemanfaatan teknologi informasi yang memadai juga menjadi keunggulan BBPOM Bandar Lampung dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi. Sistem pelaporan dan pengumpulan database telah menggunakan sistem elektronik. Dengan sistem berbasis teknologi memungkinkan pengolahan data pengawasan yang lebih cepat, penyampaian informasi kepada masyarakat yang lebih efektif, serta pengelolaan administrasi yang terintegrasi. BBPOM di Bandar Lampung telah memanfaatkan teknologi informasi dalam mendukung pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui subsite <https://lampung.pom.go.id> ; penggunaan portal APLIKASI-KU dimana didalamnya memuat informasi aplikasi internal BPOM, internal BBPOM di Bandar Lampung dan aplikasi eksternal; penggunaan aplikasi yang terintegrasi dengan lintas sektor/pemerintah daerah seperti OSS dan pemanfaatan media sosial sebagai sarana Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE).

4. Penerapan Sistem Mutu Terintegrasi

Dalam rangka memastikan seluruh kegiatan operasional berjalan sesuai dengan SOP yang ditetapkan, BBPOM di Bandar Lampung telah tersertifikasi berbagai sistem mutu, antara lain ISO 9001:2018 tentang Sistem Manajemen Mutu, SNI ISO/IEC 17025: 2017 tentang Kompetensi Laboratorium Pengujian, SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapanan. Sebagai bukti komitmen dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang bersih, BBPOM di Bandar Lampung mendapatkan predikat WBBM (Wilayah Bersih Bebas Melayani) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

5. Layanan Publik Dengan Kategori Pelayanan Prima

Kekuatan lainnya adalah integritas layanan publik yang telah diakui, mencerminkan komitmen BBPOM di Bandar Lampung dalam memberikan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Budaya Layanan SBM Hati (Sikam Betik Melayani Haga Kuti Bahagia = Melayani dengan tulus sampai pelanggan bahagia) selalu diterapkan oleh semua petugas Layanan di BBPOM Bandar Lampung. Letak geografis yang strategis, yaitu di pusat kota Bandar Lampung, juga memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dan pelaku usaha yang membutuhkan layanan. Selain itu, keberagaman latar belakang pegawai dari berbagai suku menjadi cerminan budaya kerja inklusif di BBPOM, yang mendorong terciptanya kerja sama dan sinergi yang harmonis dalam mencapai tujuan organisasi.

Dengan berbagai kekuatan ini, BBPOM di Bandar Lampung terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta memastikan bahwa sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di wilayah kerjanya aman, bermutu, dan bermanfaat. Strategi ini tidak hanya mendukung visi organisasi, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawasan.

BBPOM di Bandar Lampung telah mencapai kategori Pelayanan Prima pada tahun 2024, selain itu juga mendapat penghargaan *Gold Winner* Anugerah Humas Indonesia kategori Pelayanan Informasi Publik dan Informatif sub kategori Ruang Fisik Pelayanan Informasi Publik tahun 2025, serta penghargaan *Bronze Winner* Anugerah Humas Indonesia kategori PPID Terbaik sub kategori PPID Pelaksana pada tahun 2025.

6. Pemenuhan Standar Ruang Lingkup Pengujian Telah Optimum

Laboratorium BBPOM di Bandar Lampung terus berupaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk mewujudkan kemampuan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan yang unggul yang terefleksi ke dalam tiga aspek komponen *Good Laboratory Practices* (GLP) dan ditetapkan sebagai Standar Kemampuan Laboratorium. Standar tersebut merupakan acuan bagi BBPOM di Bandar Lampung untuk melakukan pemantauan kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan; menentukan kompetensi teknis penguji di laboratorium dan dasar penyusunan program pelatihan terstruktur guna peningkatan kompetensi sumber daya

manusia pada laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan; serta monitoring ketersediaan peralatan laboratorium.

Berbagai upaya dilakukan untuk peningkatan kemampuan uji laboratorium agar hasil uji yang dikeluarkan oleh laboratorium di BBPOM di Bandar Lampung berkualitas dan valid. Secara umum penguatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi penguji, ketersediaan peralatan laboratorium yang digunakan untuk pengujian dan bertambahnya kemampuan uji melalui ruang lingkup pengujian.

Berdasarkan penilaian terhadap pemenuhan masing-masing parameter pengujian yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Standar Ruang Lingkup (SRL) pengujian laboratorium BBPOM di Bandar Lampung menunjukkan peningkatan yang signifikan. Nilai SRL yang diperoleh secara berturut-turut dari tahun 2021 hingga 2024 adalah 75,85%, 83,0%, 88,7%, dan 95,42%. Nilai SRL sebesar 95,42% pada tahun 2024 menunjukkan bahwa pemenuhan standar ruang lingkup pengujian di laboratorium BBPOM Bandar Lampung telah mencapai tingkat optimal, dengan syarat minimal SRL > 65%. Laboratorium BBPOM di Bandar Lampung juga memiliki kemampuan pengujian yang baik, baik secara kimia maupun mikrobiologi, terhadap produk obat, pangan olahan, kosmetik, obat tradisional, dan suplemen kesehatan yang termasuk dalam ruang lingkup pengawasan.

1.2.2 Kelemahan (Weakness)

Dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang terus meningkat, BBPOM di Bandar Lampung tidak terlepas dari adanya area yang memerlukan perhatian dan peningkatan. Aspek-aspek tertentu dalam operasionalnya menunjukkan kelemahan yang berpotensi mempengaruhi efektivitas dan efisiensi BBPOM di Bandar Lampung menjalankan tugas dan fungsinya. Mengidentifikasi dan memahami kelemahan-kelemahan ini merupakan langkah awal yang kritis untuk memperkuat kinerja BBPOM di Bandar Lampung dalam upaya melindungi masyarakat dari risiko produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak aman. Berikut ini adalah kelemahan (*weakness*) yang dimiliki oleh BBPOM di Bandar Lampung yang memerlukan perhatian dan peningkatan.

1. Gap Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dengan Analisis Beban Kerja

(ABK)

BBPOM di Bandar Lampung juga menghadapi beberapa kelemahan yang perlu diatasi untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas pengawasan. Salah satu kelemahan utama adalah jumlah SDM yang belum memenuhi Analisis Beban Kerja (ABK), sehingga belum seimbang dengan kebutuhan operasional yang semakin kompleks. Selain itu, terdapat pegawai yang masih memerlukan peningkatan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas yang lebih efektif dan efisien. Gap antara jumlah SDM dibandingkan dengan ABK sebagai berikut:

Tabel 1.49 Jumlah SDM berdasarkan ABK

No	Jabatan	Jenis	ABK	Jumlah Pegawai	Gap	Persentase Pemenuhan
1	Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung	Struktural	1	1	0	100%
2	Kepala Bagian Tata Usaha pada Balai Besar POM di Bandar Lampung	Struktural	1	1	0	100%
3	Analisis Anggaran Ahli Madya	Fungsional	0	0	0	100%
4	Analisis Anggaran Ahli Muda	Fungsional	0	0	0	100%
5	Analisis Anggaran Ahli Pertama	Fungsional	1	1	0	100%
6	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Fungsional	1	1	0	100%
7	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Fungsional	2	0	2	0%
8	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Fungsional	1	0	1	0%
9	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Fungsional	1	1	0	100%
10	Arsiparis Ahli Muda	Fungsional	1	0	1	0%
11	Arsiparis Ahli Pertama	Fungsional	1	1	0	100%
12	Arsiparis Mahir	Fungsional	1	0	1	0%
13	Arsiparis Penyelia	Fungsional	1	0	1	0%
14	Arsiparis Terampil	Fungsional	2	0	2	0%
15	Penata Laksana Barang Terampil	Fungsional	3	2	1	67%
16	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	Fungsional	16	15	1	94%
17	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	Fungsional	35	20	15	57%

No	Jabatan	Jenis	ABK	Jumlah Pegawai	Gap	Persentase Pemenuhan
18	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	Fungsional	36	12	24	33%
19	Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia	Fungsional	0	7	-7	100%
20	Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil	Fungsional	0	1	-1	100%
21	Perencana Ahli Madya	Fungsional	1	0	1	0%
22	Perencana Ahli Muda	Fungsional	2	0	2	0%
23	Perencana Ahli Pertama	Fungsional	3	1	2	33%
24	Pranata Keuangan APBN Mahir	Fungsional	1	0	1	0%
25	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Fungsional	1	1	0	100%
26	Pranata Keuangan APBN Terampil	Fungsional	1	1	0	100%
27	Pranata Komputer Ahli Muda	Fungsional	1	1	0	100%
28	Pranata Komputer Ahli Pertama	Fungsional	2	3	-1	150%
29	Pranata Komputer Mahir	Fungsional	1	0	1	0%
30	Pranata Komputer Terampil	Fungsional	1	1	0	100%
31	Pranata SDM Aparatur Mahir	Fungsional	1	1	0	100%
32	Pranata SDM Aparatur Terampil	Fungsional	1	1	0	100%
33	Analisis Obat dan Makanan	Pelaksana	0	1	-1	100%
34	Operator Layanan Operasional	Pelaksana	0	4	-4	100%
35	Penata Kelola Obat dan Makanan	Pelaksana	0	1	-1	100%
36	Penata Layanan Operasional	Pelaksana	0	3	-3	100%
37	Pengadministrasian Perkantoran	Pelaksana	0	5	-5	100%
38	Pengelola Layanan Operasional	Pelaksana	0	2	-2	100%
39	Pengolah Data dan Informasi	Pelaksana	0	2	-2	100%
TOTAL			120	91	29	

Berdasarkan data di atas, total kebutuhan pegawai berdasarkan analisis beban kerja BBPOM di Bandar Lampung adalah 120 orang, namun baru terpenuhi sebanyak 91 pegawai, namun dari 91 pegawai tersebut hanya 65 pegawai yang memenuhi jabatan sesuai ABK. Hal ini mengakibatkan adanya kelebihan beban kerja pada pegawai di BBPOM di Bandar Lampung.

2. Sistem Penyimpanan Data Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dan Makanan Belum Terintegrasi

Sistem penyimpanan data yang terpusat sangat penting untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Namun, salah satu kelemahan signifikan dalam pengawasan saat ini adalah ketidakterediaan sistem penyimpanan data yang belum terpusat. Data terkait produk sediaan farmasi dan pangan olahan, seperti data inspeksi, sampling dan hasil uji laboratorium, data keracunan pangan sering kali tersebar di berbagai tim yang berbeda tanpa adanya sistem integrasi yang memadai. Ketidakterediaan sistem data yang terpusat ini dapat menyebabkan berbagai masalah dalam proses pengawasan, diantaranya adalah:

Pertama, ketidakpastian dan keterlambatan dalam mengakses informasi menjadi hambatan utama. ASN atau petugas pengawas yang memerlukan data penting mengenai suatu produk obat atau makanan, seperti status registrasi atau riwayat inspeksi, harus mencari informasi tersebut di berbagai sumber yang berbeda. Proses ini memakan waktu dan meningkatkan potensi kesalahan, yang pada gilirannya mengurangi respons yang cepat terhadap masalah yang muncul. Selain itu, ketika data tidak terintegrasi dengan baik, maka tidak ada satu sumber informasi yang dapat diandalkan, sehingga meningkatkan risiko terjadinya duplikasi atau inkonsistensi dalam pengolahan data.

Kedua, tanpa sistem penyimpanan data yang terpusat, koordinasi antara berbagai tim. Hal ini juga mempersulit pelaporan dan analisis tren peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal atau berbahaya, karena tidak ada data yang dapat digabungkan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang ada.

Ketiga, ketidakterediaan data terpusat menghambat penggunaan teknologi canggih dalam pengawasan. Sistem berbasis teknologi, seperti analisis big data atau kecerdasan buatan, membutuhkan data yang lengkap, terstruktur, dan mudah diakses. Tanpa data yang terpusat, kemampuan untuk menggunakan teknologi ini menjadi terbatas, yang memperlambat deteksi dini terhadap pelanggaran atau risiko yang mungkin muncul dalam distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan.

Untuk mengatasi kelemahan ini, penting untuk mengembangkan dan menerapkan sistem penyimpanan data yang terpusat, yang memungkinkan akses data yang lebih cepat, akurat, dan konsisten. Implementasi sistem teknologi informasi yang terintegrasi, seperti sistem manajemen data berbasis cloud atau basis data terpusat, akan memungkinkan pengawasan yang lebih efisien dan transparan. Selain itu, pelatihan bagi ASN dan petugas pengawas dalam menggunakan sistem baru ini sangat penting untuk memastikan bahwa data yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Dengan sistem penyimpanan data yang terpusat, pengawasan akan menjadi lebih terkoordinasi, cepat, dan responsif terhadap tantangan yang ada.

1.2.3 Peluang (Opportunity)

Komponen peluang (opportunity) dalam SWOT merefleksikan prospek strategis untuk memperkuat efektivitas dan meningkatkan cakupan layanan dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Mengeksplorasi peluang juga dapat membuka jalan bagi BBPOM di Bandar Lampung untuk memposisikan diri sebagai lembaga pengawas yang proaktif dan inovatif, meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa Indonesia tetap sejalan dengan standar global dalam pengawasan keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan. Berikut ini adalah peluang yang dimiliki oleh BBPOM di Bandar Lampung untuk memperluas dan memperkuat perannya di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. BBPOM di Bandar Lampung memiliki sejumlah peluang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, yaitu:

1. Pertumbuhan UMKM di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkembang pesat

Pertumbuhan UMKM di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan yang berkembang pesat memberikan kesempatan untuk memperluas pembinaan terhadap pelaku usaha lokal agar mereka mampu menghasilkan produk yang memenuhi standar keamanan dan mutu. Dengan mendukung UMKM, BBPOM tidak hanya berperan dalam pengawasan, tetapi berperan dalam meningkatkan daya saing mutu produk di pasar lokal maupun global sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

2. Dukungan Stakeholder pada Program Pengawasan BBPOM di Bandar Lampung

BBPOM di Bandar Lampung mendapat dukungan yang cukup baik dari para stakeholder. Dukungan ini, baik dari pemerintah daerah, akademisi, maupun asosiasi pelaku usaha, menjadi modal penting untuk memperkuat pengawasan dan implementasi kebijakan yang relevan. Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap keberadaan BBPOM juga menjadi dorongan positif bagi lembaga ini untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan demi memenuhi kebutuhan masyarakat.

3. Kemudahan Akses Layanan Publik Melalui SPBE di BBPOM di Bandar Lampung

Pemerintah terus berupaya melaksanakan percepatan transformasi digital melalui penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) terpadu dari pusat hingga ke daerah. Transformasi digital dalam rangka mencapai tujuan reformasi birokrasi yaitu mewujudkan pemerintahan yang terbuka partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan kolaborasi antar-instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan. SPBE merupakan suatu keharusan dalam peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik sehingga dapat meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik.

Penerapan SPBE BBPOM di Bandar Lampung diharapkan juga dapat turut andil dalam mendorong akselerasi transformasi digital Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan kemudahan akses layanan publik oleh seluruh masyarakat.

4. Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) untuk Meningkatkan Pertumbuhan Industri Domestik

Pengadaan barang dan jasa menggunakan produk dalam negeri (PDN) merupakan langkah strategis yang dilakukan pemerintah mendukung pertumbuhan industri dalam negeri. Berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang No.3 Tahun 2014 yang mewajibkan untuk menggunakan produk dalam negeri dalam setiap pengadaan barang/jasanya (K/L/PD/BUMN/BUMD/BU Swasta/Mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara). Kebijakan pengadaan Produk Dalam Negeri (PDN) telah terbukti berdampak positif pada

pertumbuhan industri nasional melalui peningkatan belanja pemerintah, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK), serta efek pengganda (*multiplier effect*) ekonomi. Melalui pengadaan PDN, pemerintah mengutamakan penggunaan produk dalam negeri yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri lokal serta mengurangi ketergantungan pada produk impor. Proses pengadaan ini dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan persaingan sehat, yang bertujuan untuk memastikan kualitas dan harga barang atau jasa yang diperoleh sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pemerintah, melalui kebijakan yang mendukung, berupaya meningkatkan kemampuan industri domestik dan SDM yang terlibat dalam pengadaan, serta memperkuat sistem pengawasan untuk memastikan bahwa pengadaan dilakukan dengan benar dan sesuai dengan peraturan.

5. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu

Tabel 1.50 Capaian Indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	71,00	82,64	116,39
2021	85,00	71,20	83,76
2022	87,00	75,29	86,54
2023	80,00	88,16	110,20
2024	91,00	95,37	104,80

Dalam era informasi yang semakin terbuka, kesadaran masyarakat mengenai sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu menjadi salah satu elemen kunci dalam mendukung tugas BBPOM di Bandar Lampung. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu sediaan farmasi dan pangan olahan sehingga menjadi peluang besar bagi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah Provinsi Lampung lebih efektif. Berdasarkan tabel di atas, nilai indeks kesadaran masyarakat (*awareness*

index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu meningkat secara terus-menerus sejak tahun 2022 hingga 2024.

Kesadaran masyarakat yang meningkat membuat masyarakat lebih memahami pentingnya memilih produk obat dan makanan yang aman dan bermutu. Hal ini akan mendorong kepatuhan dalam mematuhi regulasi, seperti membeli produk berizin edar BPOM, membaca label produk, dan menghindari barang ilegal atau berbahaya.

Kesadaran masyarakat memungkinkan mereka untuk berperan sebagai pengawas aktif. BBPOM di Bandar Lampung membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan aktif melakukan pengawasan dan pelaporan akan adanya isu-isu di masyarakat terkait obat dan makanan melalui jalur pelaporan *Call Me Back* Ulun Lampung.

6. Peningkatan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Melalui Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Adanya DAK dapat menjadikan peluang peningkatan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai dengan inpres 3 tahun 2017. Sebagai implementasi terkait dengan Permendagri No.41 tahun 2018 tentang peningkatan koordinasi pembinaan dan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di daerah, BPOM memberikan alokasi DAK non fisik sebagai stimulus pemerintah daerah meningkatkan peran pembinaan dan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai yang tertuang di Permendagri.

7. Sinergitas yang Baik dengan Lintas Sektor

BBPOM di Bandar Lampung senantiasa membangun sinergi dengan pihak-pihak lain, seperti pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Bentuk sinergi yang telah terbentuk antara lain dengan pelaksanaan Program Nasional Keamanan Pangan di sekolah, desa, dan pasar yang terintegrasi dengan Program Pemerintah Daerah setempat; pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan bersama Pemerintah Daerah; Kolaborasi dengan lintas sektor terkait pembinaan UMKM di Provinsi Lampung; Keterlibatan BBPOM di Bandar Lampung dalam Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG) dan masuk dalam Tim Gerak Cepat penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan di Provinsi Lampung; Penanganan program peanggunan resistensi

antibiotik bersama organisasi profesi kesehatan (Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia dan Ikatan Bidan Indonesia).

Sinergitas yang terjalin memperkuat pelaksanaan program pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di Provinsi Lampung.

8. Keterbukaan Informasi Publik

BBPOM di Bandar Lampung sebagai badan publik senantiasa berkomitmen dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik secara berkelanjutan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam sistem pengawasan Obat dan Makanan melalui penyediaan, pengumuman/publikasi, dan pelayanan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.

Monev pengelolaan Informasi dan Dokumen telah dilaksanakan oleh BBPOM di Bandar Lampung secara menyeluruh yang meliputi pengembangan media pelayanan, pengumuman informasi publik, pelayanan informasi publik dan penyediaan informasi publik sehingga memberikan dampak kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh Informasi yang dibutuhkan seputar layanan, kinerja, dan anggaran. Dalam periode 2 tahun berturut-turut (2023-2024) mendapat penghargaan sebagai UPT dengan kategori “Informatif”. Hal ini menggambarkan bahwa BBPOM di Bandar Lampung telah menerapkan Keterbukaan Informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.

9. Tingginya Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja BBPOM di Bandar Lampung

Pelayanan publik yang baik merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang berdampak dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik, BBPOM harus melakukan perbaikan secara terus menerus terutama dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna layanan. Berbagai cara dilakukan BBPOM untuk perbaikan layanan, diantaranya penyederhanaan prosedur pelayanan, penerapan standar layanan, menjangkau masukan perbaikan melalui survei kepuasan masyarakat, pemenuhan penyelenggaraan pelayanan publik termasuk pemenuhan sarana prasarana ramah kelompok rentan dan penanganan pengaduan serta pengembangan inovasi untuk percepatan pelaksanaan layanan.

Sosialisasi terkait 3 unsur terendah dalam Survei Kepuasan Masyarakat yaitu: Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, serta Waktu Penyelesaian layanan, telah dilakukan melalui subsite, media sosial dan media luar ruang. BBPOM Lampung sangat memperhatikan masukan dari masyarakat melalui SKM sebagai upaya memperbaiki dan lebih meningkatkan pelayanan. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat BBPOM di Bandar Lampung cenderung meningkat dari tahun 2022 hingga 2024.

Tabel 1.48 Capaian Kinerja Indikator **Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan** Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	79,54	66,78	83,96
2022	81,37	77,51	95,26
2023	83,19	87,51	105,19
2024	87,60	88,74	101,30

1.2.4 Ancaman (*Threat*)

Ancaman dalam analisis SWOT merujuk pada faktor eksternal yang dapat mengganggu atau menghambat pencapaian tujuan strategis BBPOM di Bandar Lampung. Penyusunan strategi yang efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang potensi ancaman ini, sehingga BBPOM di Bandar Lampung dapat merancang langkah-langkah mitigasi yang tepat. Berikut adalah beberapa komponen Ancaman (*Threat*) yang dapat mempengaruhi BBPOM di Bandar Lampung dalam penyusunan rencana strategisnya selama lima tahun yang akan datang:

1. Penggunaan Antibiotik yang Tidak Sesuai Ketentuan Menyebabkan *Anti Microbial Resistance (AMR)*

Antimicrobial Resistance (AMR), atau resistensi antimikroba, merupakan ancaman kesehatan global yang serius, dan dampaknya sudah terasa hingga ke tingkat lokal, termasuk di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung. Resistensi ini terjadi ketika mikroorganisme (seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit) menjadi kebal terhadap obat yang dirancang untuk membunuh atau menghambat pertumbuhannya.

Penyebab utama dari meningkatnya AMR adalah penggunaan antibiotik yang tidak sesuai ketentuan (misuse dan overuse). Di lapangan, BBPOM di Bandar Lampung menemukan beberapa hal yang berkontribusi pada masalah ini:

- **Pemberian Tanpa Resep yang Sah (Tanpa Pengawasan Tenaga Kesehatan):**
Masih ditemukan praktik di mana obat-obatan, termasuk antibiotik, dapat diperoleh tanpa resep dokter yang benar di sarana Apotek. Kecenderungan tersebut seringkali disebabkan efisiensi biaya dibandingkan jika harus berobat dahulu ke dokter serta adanya rekomendasi dari teman atau kerabat. Berdasarkan data hasil pengawasan Tahun 2024, ditemukan sebanyak 74,51% dari 110 sarana Apotek yang telah diperiksa oleh BBPOM di Bandar Lampung masih melakukan penyerahan/penjualan antimikroba tanpa resep dokter. Hal ini menunjukkan masih tingginya “supply and demand” penggunaan antrimikroba yang tidak rasional di masyarakat. Penggunaan antimikroba tanpa indikasi klinis yang jelas mempercepat seleksi bakteri resisten.
- **Ketidakpatuhan Pasien**
Pasien seringkali menghentikan pengobatan antimikroba dalam hal ini antibiotik sebelum waktunya ketika merasa gejalanya mereda. Dosis yang tidak tuntas ini tidak membunuh seluruh populasi bakteri penyebab infeksi, melainkan hanya menyisakan bakteri terkuat yang kemudian berkembang biak dan menjadi resisten.
- **Penggunaan pada Hewan yang Tidak Terkontrol**
Meskipun bukan wewenang inti BBPOM di Bandar Lampung, penggunaan antimikroba yang berlebihan dalam peternakan dan perikanan di wilayah Lampung dapat menyebarkan resistensi ke lingkungan dan pada akhirnya, ke manusia.

2. Serangan Siber terhadap Keamanan Data

Transformasi digital dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan merupakan langkah strategis yang berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi informasi (TI) telah mendukung berbagai fungsi inti, termasuk registrasi elektronik, pelaporan efek samping, digitalisasi hasil pengujian laboratorium, serta penyediaan informasi yang cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Meskipun demikian, ketergantungan yang semakin tinggi terhadap sistem TI menjadikan sektor pengawasan obat dan makanan rentan terhadap berbagai risiko dan ancaman keamanan siber. Serangan seperti malware, ransomware, dan phishing berpotensi merusak sistem, mengganggu proses bisnis, serta mengakibatkan akses tidak sah terhadap data sensitif. Risiko kebocoran atau manipulasi data penting, seperti informasi produk, hasil uji laboratorium, maupun laporan efek samping, juga menimbulkan dampak signifikan terhadap kelangsungan layanan, kepatuhan terhadap regulasi, dan kredibilitas lembaga. Ancaman tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga berdampak pada dimensi hukum, tata kelola, perlindungan data, serta kepercayaan publik. Dengan demikian, identifikasi dan pengelolaan risiko keamanan TI merupakan bagian integral dalam pencapaian sasaran strategis organisasi.

Kerentanan pada aplikasi yang digunakan, baik berupa bug maupun celah keamanan, turut menjadi perhatian karena dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak berwenang. Ancaman dari dalam organisasi, termasuk potensi penyalahgunaan akses data oleh personel internal, semakin memperluas spektrum risiko. Selain itu, pemalsuan dokumen digital—seperti izin edar atau sertifikasi keamanan produk—menjadi isu yang semakin relevan seiring pesatnya perkembangan teknologi, sehingga menuntut penguatan pengamanan terhadap integritas data dan dokumen elektronik.

Dalam rangka memitigasi berbagai ancaman tersebut, diperlukan pendekatan pengamanan yang komprehensif, terintegrasi, dan berkesinambungan. Upaya penguatan keamanan siber dapat dilaksanakan melalui penerapan web application firewall, penggunaan enkripsi data pada proses penyimpanan maupun transmisi, serta optimalisasi mekanisme autentikasi dan otorisasi untuk memastikan pengendalian akses yang tepat. Di samping itu, penguatan tata kelola keamanan informasi perlu dilakukan melalui penyusunan, implementasi, dan evaluasi kebijakan keamanan informasi, pelaksanaan audit keamanan secara berkala, serta pemantauan aktivitas pengguna secara berkesinambungan.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan terkait keamanan informasi menjadi komponen penting dalam mencegah insiden yang disebabkan oleh kelalaian atau ketidaktahuan pengguna. Penguatan keamanan aplikasi melalui uji penetrasi (penetration testing) serta penerapan standar pengembangan yang sesuai regulasi dapat meminimalisasi potensi kerentanan.

Selanjutnya, pelaksanaan pencadangan data (backup) dan penyusunan rencana pemulihan bencana (disaster recovery plan) diperlukan untuk memastikan keberlanjutan operasional apabila terjadi gangguan atau insiden keamanan.

Kolaborasi dengan lembaga keamanan siber nasional, penyedia teknologi, serta aparat penegak hukum akan memperkuat kapasitas organisasi dalam mendeteksi, merespons, dan menanggulangi ancaman siber secara efektif. Dengan penerapan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan integritas, ketersediaan, dan kerahasiaan data dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dapat senantiasa terjaga di tengah dinamika ancaman keamanan TI yang terus berkembang.

3. Modus Operandi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berkembang

Di tengah kemajuan teknologi dan globalisasi, kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan menunjukkan pola yang semakin canggih dan kompleks. Modus operandi para pelaku kejahatan terus berkembang, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan produk-produk kesehatan dan pangan yang berkualitas. Salah satu ancaman utama adalah peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal, termasuk produk palsu yang dipasarkan melalui jalur distribusi tidak resmi, seperti *e-commerce* dan media sosial. Produk-produk ini sering kali tidak memenuhi standar keamanan dan mutu, sehingga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.

Selain itu, terdapat upaya manipulasi data dan dokumen yang semakin sulit terdeteksi, seperti pemalsuan nomor registrasi BPOM, sertifikasi halal, atau dokumen pendukung lainnya. Pelaku juga menggunakan strategi pencampuran bahan berbahaya atau zat aktif dalam produk tanpa mencantumkannya pada label, sehingga konsumen tidak menyadari risiko yang mereka hadapi. Tidak hanya itu, praktik relabeling dan repackaging juga menjadi modus yang sering digunakan untuk memperpanjang masa edar produk yang sudah kedaluwarsa atau mengelabui pengawasan.

Dalam konteks digital, kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan semakin sulit dilacak karena penggunaan teknologi canggih. Pelaku memanfaatkan jaringan perdagangan lintas negara untuk mendistribusikan

produk ilegal, memanfaatkan platform daring yang menawarkan anonimitas. Beberapa bahkan menggunakan dark web untuk memperdagangkan obat-obatan terlarang atau makanan berbahaya yang sulit diawasi oleh otoritas. Tantangan ini diperparah dengan kemampuan pelaku untuk menghindari deteksi, misalnya dengan mengubah kemasan, menyembunyikan produk di antara barang legal, atau menggunakan dokumen palsu untuk menyamarkan kegiatan mereka.

Ancaman dari modus operandi yang semakin berkembang ini tidak hanya membahayakan kesehatan masyarakat tetapi juga mengancam stabilitas sistem pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang lebih inovatif dan kolaboratif. BPOM dan instansi terkait harus memperkuat teknologi pengawasan, seperti penggunaan big data dan kecerdasan buatan untuk mendeteksi pola distribusi mencurigakan. Peningkatan kerja sama dengan aparat penegak hukum, otoritas internasional, dan pelaku industri juga menjadi kunci dalam membongkar jaringan kejahatan ini. Selain itu, edukasi masyarakat untuk lebih kritis terhadap produk yang mereka konsumsi sangat penting untuk mengurangi ruang gerak pelaku.

Beberapa modus operandi kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang terjadi di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung antara lain:

- Menggunakan nomor izin edar palsu atau milik produk lain.
- Menggunakan kemasan, label, hologram, atau nomor batch palsu yang menyerupai produk asli.
- Mengedarkan produk kosmetik secara bundling (menggabungkan produk terdaftar dan tidak terdaftar dalam satu paket)
- Memproduksi dan mengedarkan obat ilegal (obat setelan)
- Membuat akun toko baru setiap waktu tertentu untuk menghindari identifikasi petugas

Dengan pendekatan yang komprehensif, BBPOM di Bandar Lampung dapat menghadapi ancaman dari modus operandi kejahatan yang semakin berkembang, sekaligus memastikan bahwa produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di masyarakat aman, bermutu, dan terjamin keasliannya.

4. Peredaran Produk Ilegal Lintas Batas Akibat Globalisasi dan Pasar Bebas

Era globalisasi ditandai dengan meningkatnya konektivitas antar negara melalui perkembangan teknologi informasi, transportasi, dan sistem logistik internasional. Perdagangan bebas yang diberlakukan melalui berbagai perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral mengurangi hambatan tarif, mempercepat arus barang, dan membuka akses pasar secara lebih luas. Kondisi ini membawa dampak positif dalam bentuk peningkatan pilihan produk, percepatan inovasi, dan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, globalisasi juga menghadirkan tantangan signifikan bagi negara-negara, termasuk Indonesia, dalam menjaga keamanan, dan mutu produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di dalam negeri.

Globalisasi menyebabkan tidak adanya lagi batasan antara satu negara dengan negara lainnya. Seseorang dapat terhubung di seluruh penjuru dunia tanpa ada batasan ruang dan waktu. Dengan teknologi dan kemudahan akses, perdagangan dunia akan semakin terbuka luas melewati batas suatu negara. Selain memberikan dampak positif, globalisasi juga memberikan dampak negatif seperti masuknya berbagai macam produk sediaan farmasi dan pangan olahan impor ilegal dari negara lain.

Perdagangan daring lintas batas (*cross-border marketplace*) terutama sediaan farmasi dan pangan olahan memungkinkan konsumen membeli produk langsung dari luar negeri tanpa melalui mekanisme verifikasi atau izin edar dari Badan POM. Platform digital juga kerap dimanfaatkan untuk menjual produk obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, atau pangan olahan yang tidak terdaftar. Kompleksitas rantai pasok global menyebabkan kesulitan dalam pelacakan asal produk, jalur distribusi, dan pihak yang bertanggung jawab. Produk ilegal dapat memasuki pasar melalui penyelundupan baik skala besar maupun skala kecil yang dilakukan individu, *repackaging* dan pemalsuan dokumen impor. Fenomena ini menimbulkan berbagai dampak terhadap kesehatan masyarakat dan keamanan konsumen. Masuknya produk ilegal menciptakan persaingan tidak sehat karena harga jauh lebih murah, tidak membayar pajak dan bea masuk, kompleksitas arus barang yang masuk melalui pelabuhan besar dengan lalu lintas kontainer tinggi, jalur perbatasan darat yang panjang, transaksi digital yang tidak mudah ditelusuri, pengiriman

paket kecil yang kini menjadi modus utama penyelundupan produk ilegal. Hal ini mengakibatkan peningkatan beban pengawasan.

Menghadapi dinamika global ini, diperlukan pendekatan pengawasan yang menyeluruh, meliputi Penguatan Sistem Pengawasan Berbasis Risiko dengan:

- Pemanfaatan *risk profiling* pada importir, jalur logistik, barang kiriman, dan *marketplace*.
- Integrasi data antara BPOM, Bea Cukai, penyedia platform digital, dan otoritas terkait.
- Kolaborasi dengan institusi terkait.
- Peningkatan Kapasitas SDM dan Infrastruktur melalui pelatihan SDM.
- Penyediaan perangkat rapid test di lokasi titik perbatasan.
- Edukasi dan Komunikasi Publik melalui kampanye literasi konsumen terkait ciri produk ilegal, bahaya produk tanpa izin edar, dan cara verifikasi izin edar.

Modus operandi lintas batas kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang terjadi di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung antara lain:

- Sediaan farmasi dan pangan olahan yang berasal dari negara China diperoleh dari *marketplace* daring dan diedarkan kembali melalui *marketplace* daring oleh akun toko yang berupa sarana rumah.
- Sarana toko mengedarkan produk pangan olahan impor yang berasal dari negara Jepang modus pemasukannya dengan cara barang tentengan.

5. Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB-KP) Pada Program Pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG)

MBG merupakan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025. Program ini disusun dalam rangka mewujudkan tujuan nasional Indonesia Emas tahun 2045. Penerima manfaat MBG adalah anak sekolah, pesantren, serta ibu hamil dan menyusui yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jika program ini tidak dikelola dengan baik, ditambah dengan banyaknya jumlah penerima manfaat, maka berisiko mengakibatkan terjadinya keracunan pangan. Keracunan pangan menjadi ancaman kesehatan masyarakat yang dapat menghambat tercapainya Indonesia Emas 2045. Di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung, implementasi program ini membawa serta risiko tinggi terjadinya Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB-KP), yang bukan hanya mengancam kesehatan

penerima manfaat, tetapi juga menjadi ancaman serius terhadap kredibilitas dan operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT) itu sendiri.

BBPOM di Bandar Lampung merupakan anggota satuan tugas percepatan penyelenggaraan program MBG di provinsi Lampung. Selain itu BBPOM di Bandar Lampung adalah anggota Tim Gerak Cepat KLB-KP di Provinsi Lampung. Kejadian KLB-KP dalam Program MBG di wilayah Lampung akan memicu tiga ancaman utama bagi BBPOM di Bandar Lampung, sebagai berikut:

1. Kerusakan Reputasi dan Kepercayaan Publik

Ketika terjadinya KLB-KP, masyarakat akan mempertanyakan efektivitas fungsi pengawasan BBPOM di Bandar Lampung. Hasilnya adalah penurunan kepercayaan terhadap pangan olahan secara umum dan skeptisisme terhadap kemampuan BBPOM di Bandar Lampung dalam melindungi konsumen. Akibatnya, BBPOM terpaksa mengalokasikan sumber daya besar hanya untuk mengelola krisis dan melakukan klarifikasi, mengganggu tugas rutin lainnya, seperti pengawasan obat, kosmetik, atau program prioritas lain seperti Desa Pangan Aman.

2. Keterbatasan Sumber Daya Operasional (Investigasi Cepat)

Setiap KLB-KP memerlukan Tim Gerak Cepat (TGC) yang harus bergerak segera untuk penyelidikan epidemiologi, pengambilan sampel di lokasi, dan pengujian laboratorium. Akibatnya, BBPOM Bandar Lampung harus memobilisasi penuh tim pengawas dan analis laboratorium. Jika KLB terjadi secara simultan atau berulang di berbagai lokasi, kapasitas dan kecepatan uji lab akan mencapai batasnya, berpotensi menunda penemuan sumber kontaminasi dan penarikan produk.

3. Konflik Lintas Sektor dan Legalitas

KLB-KP merupakan urusan lintas sektor yang melibatkan Dinas Kesehatan (penanganan korban), Dinas Pendidikan/Sosial (pelaksanaan program), dan pihak penyedia (SPPG/katering). BBPOM bertugas menentukan sumber kontaminasi pangan. Sehingga BBPOM Bandar Lampung akan berada di garis depan penegakan hukum terhadap penyedia pangan. Proses penyidikan dan penindakan (Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS) harus dilakukan dengan cermat dan tanpa cela untuk memastikan efek jera, sekaligus menjaga

koordinasi yang harmonis dengan Pemerintah Daerah agar program MBG tetap berjalan aman.

Tabel 1.51 Matrix Analisis SWOT

<u>STRENGTH</u> 1. Kompetensi Pegawai BBPOM di Bandar Lampung Memadai 2. Pemanfaatan Anggaran yang Akuntabel 3. Pemanfaatan Teknologi Informasi yang Memadai 4. Penerapan Sistem Mutu Terintegrasi 5. Layanan Publik dengan Kategori Layanan Prima 6. Pemenuhan Standar Ruang Lingkup Pengujian Telah Optimum	<u>WEAKNESS</u> 1. Gap Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dengan Analisis Beban Kerja (ABK) 2. Sistem Penyimpanan Data Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Belum Terintegrasi
<u>OPPORTUNITIES</u> 1. Pertumbuhan UMKM di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berkembang Pesat 2. Dukungan <i>Stakeholder</i> Pada Program Pengawasan BBPOM di Bandar Lampung 3. Kemudahan Akses Layanan Publik Melalui SPBE di BBPOM di Bandar Lampung 4. Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) untuk Meningkatkan Pertumbuhan Industri Domestik 5. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu 6. Sinergitas yang Baik dengan Lintas Sektor 7. Keterbukaan Informasi Publik 8. Tingginya Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja BBPOM di Bandar Lampung	<u>THREATS</u> 1. Penggunaan Antibiotik yang Tidak Sesuai Ketentuan Menyebabkan Anti Microbial Resistance (AMR) 2. Serangan Siber terhadap Keamanan Data 3. Modus Operandi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berkembang 4. Peredaran Produk Ilegal Lintas Batas Akibat Globalisasi dan Pasar Bebas 5. Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB-KP) Pada Program Pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG)

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

II.1 VISI

BBPOM di Bandar Lampung sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan unit pelaksana teknis yang bertanggungjawab dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan berdasarkan wilayah kerja yang telah ditetapkan dalam mendukung pencapaian Visi BPOM periode 2025-2029, yaitu:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.

2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.

3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional termasuk UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya

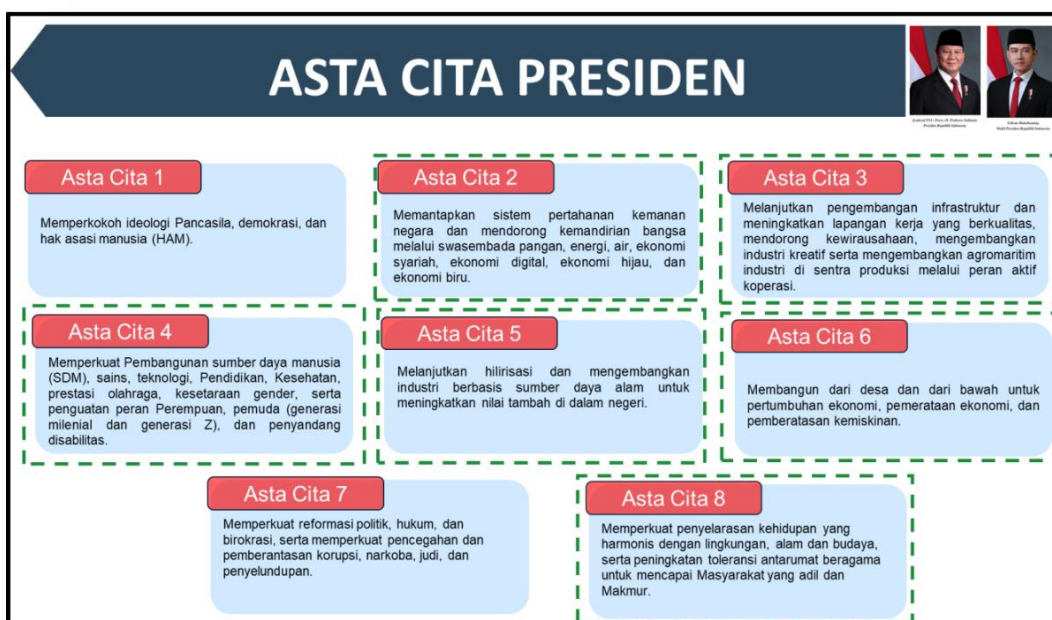
seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.

4. Masyarakat Sehat dan Sejahtera: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BBPOM di Bandar Lampung terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BBPOM di Bandar Lampung dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan serta pembinaan kepada industri dan UMKM dalam rangka peningkatan daya saing.

II.2 MISI

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 2.1. Misi Presiden (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip *good governance* dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

Balai Besar POM di Bandar Lampung sesuai tugas dan fungsinya mendukung seluruh pelaksanaan misi BPOM.

II.3 TUJUAN BPOM

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan untuk periode 2025-2029. Tujuan tersebut dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025-2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan organisasi:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.

2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, BPOM berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.

3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dukungan yang kuat terhadap UMKM: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan UMKM di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.

5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Berbagai tujuan tersebut diukur melalui indikator sebagaimana tercantum pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1. Indikator Tujuan BPOM 2025-2029

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	74,75	76,4	77,75	79,45	80,7
2	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88,20	88,60	88,90	89,20	89,40
3	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan	Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	63,6	66,2	69,3	72,7	76,7

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	dukungan yang kuat terhadap UMKM						
4	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74,4	75,9	77,1	78,5	79,9
5	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96,3	96,35	96,4	96,45	96,5

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Balai Besar POM di Bandar Lampung sesuai tugas dan fungsinya mendukung seluruh tujuan BPOM.

II.4 SASARAN KEGIATAN

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, serta mewujudkan kondisi yang secara nyata yang akan dicapai oleh BBPOM di Bandar Lampung, sesuai dengan tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis nasional dan global, BBPOM di Bandar Lampung telah merumuskan

sejumlah Sasaran Kegiatan untuk periode 2025 – 2029. Sasaran-sasaran ini dirancang untuk memperkuat fondasi dan fungsi pengawasan BBPOM di Bandar Lampung, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Berikut adalah Sasaran Kegiatan BBPOM di Bandar Lampung 2025 - 2029 berikut dengan penjelasannya, yang mencakup berbagai aspek kunci dari pengawasan hingga edukasi publik, dalam upaya mencapai keamanan, kualitas, dan kemandirian di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan.

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi BPOM yang ingin dicapai Balai Besar POM di Bandar Lampung, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Bandar Lampung akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut:

SK 1: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), UPT berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
- Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
- e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- f. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
- g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- i. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- k. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
- l. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
- m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
- n. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
- o. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
- p. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

SK 2: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Pangan fortifikasi adalah makanan yang telah melalui proses penambahan zat gizi tertentu, untuk meningkatkan kualitas gizinya dan memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen. UPT BPOM berperan memastikan bahwa setiap sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerjanya mematuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan secara efektif, terencana, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjamin mutu serta keamanan produk yang dihasilkan. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

SK 3: Meningkatkan efektivitas KIE

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. UPT BPOM harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:

- a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
- b. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
- c. Jumlah desa pangan aman
- d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

SK 4: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, UPT BPOM berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

SK 5: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, UPT BPOM berperan penting dalam melaksanakan penindakan

secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

SK 6: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, UPT BPOM mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

SK 7: Layanan Publik UPT yang prima

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UPT BPOM berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik UPT.

SK 8: Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan UPT BPOM merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan,

akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
- b. Nilai AKIP UPT BPOM
- c. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
- d. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Tabel 2.1 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM Terkait Tugas dan Fungsi UPT BPOM serta Sasaran Kegiatan dan Indikator Balai Besar POM di Bandar Lampung periode 2025-2029

Visi:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu Indikator: <i>Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indikator: 1. <i>Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu</i> 2. <i>Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu (2025)</i> 3. <i>Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu (2026-2029)</i> 4. <i>Indeks Efektivitas Koordinasi</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Indikator: 1. <i>Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 2. <i>Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO</i> 3. <i>Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 4. <i>Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar</i> 5. <i>Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 6. <i>Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
		Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 5. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 6. Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan	ditindaklanjuti oleh stakeholder 7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan 12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar 13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT 14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			15. <i>Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman</i> 16. <i>Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029)</i>
			Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi <i>Indikator:</i> <i>Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> <i>Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT</i>
			Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> <i>Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM <i>Indikator:</i> Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu <i>Indikator:</i> Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> Indeks Kesadaran Masyarakat	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan	Meningkatnya efektivitas KIE <i>Indikator:</i> 1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT 2. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan 3. Jumlah desa pangan aman

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
	<i>terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	<i>Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	4. <i>Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas</i>
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima <i>Indikator: Indeks RB BPOM</i>	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima <i>Indikator: Indeks RB BPOM</i>	Layanan Publik UPT yang prima <i>Indikator: Indeks Pelayanan Publik UPT</i>
			Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal <i>Indikator:</i> 1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM 2. Nilai AKIP UPT BPOM 3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM 4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM 5. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT 6. Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar 7. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT

Dalam pencapaian sasaran kegiatan secara optimal tentu akan berhadapan dengan ketidakpastian sehingga perlu dilakukan identifikasi risiko dari setiap Sasaran Kegiatan tersebut. Melalui identifikasi risiko, berbagai potensi hambatan dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan program dapat dikenali sejak dini. Hal ini memungkinkan BBPOM di Bandar Lampung untuk mengambil langkah antisipatif dan strategi mitigasi yang tepat, sehingga mendukung tercapainya sasaran strategis dengan lebih efektif dan efisien. Identifikasi risiko tentunya disusun sebagai bagian integral dari proses perencanaan strategis, guna memastikan pengelolaan risiko yang sistematis dan terukur dalam mendukung kinerja organisasi. Berikut adalah identifikasi indikasi risiko sasaran strategis BBPOM di Bandar Lampung sebagaimana tercantum dalam tabel 2.2.

Tabel 2.2 Indikasi Risiko

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
1.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Keterlambatan tindak lanjut hasil pengawasan akibat keterbatasan sumber daya pengujian dan koordinasi lintas fungsi.	Penguatan koordinasi antar fungsi, penyusunan prioritas tindak lanjut berbasis risiko, serta pemantauan berkala progres tindak lanjut.	Fungsi Pemeriksaan dan Pengujian
		Keterlambatan pelaporan hasil pengawasan sampel regional yang melibatkan beberapa UPT akibat keterbatasan sumber daya pengujian dan koordinasi lintas UPT	Penguatan koordinasi antar UPT terkait sampling dan pengujian agar sesuai perencanaan dan <i>timeline</i> yang telah ditetapkan	Fungsi Pemeriksaan dan Pengujian

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		- Keterlambatan pengambilan sampel KLB akibat kendala koordinasi lapangan. - Meningkatnya jumlah kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan (KP) secara nasional	Peningkatan kesiapsiagaan tanggap KLB dan pembentukan tim gerak cepat penanganan KLB. a. Memastikan keamanan dan mutu pangan melalui pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), bimbingan teknis terhadap Pengawas, SPPI, SPPG, serta dukungan laboratorium untuk mendeteksi cemaran dan penanganan KLB KP. b. Koordinasi dengan BGN terkait pengawasan SPPG dan pelatihan terhadap Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), Penjamah Pangan di SPPG dan penerima manfaat.	Fungsi Pemeriksaan dan Pengujian

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		- Rendahnya kepatuhan pelaku usaha PIRT terhadap hasil pengawasan. - Kurangnya komitmen <i>stakeholder</i> dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan PIRT.	Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha. - Monitoring terhadap rekomendasi tindak lanjut temuan.	Fungsi Pemeriksaan
		Penayangan iklan tidak sesuai ketentuan pada berbagai platform digital sulit dikendalikan.	Pemantauan iklan daring dan melaporkan hasil pemantauan ke BPOM secara periodik.	Fungsi Pemeriksaan
		Rendahnya kepatuhan apotek dalam penyerahan antibiotik berdasarkan resep dokter.	Bimbingan teknis kepada penanggungjawab apotek dan pemantauan penyerahan antibiotik, serta koordinasi lintas sektor dalam program pengendalian AMR.	Fungsi Pemeriksaan dan Infokom

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		Keterbatasan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pangan aman.	Penguatan koordinasi lintas sektor dan fasilitasi teknis dalam penerapan program pangan aman.	Fungsi Infokom
2.	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam memenuhi standar fortifikasi pangan.	Sosialisasi regulasi, pendampingan IP-CPPOB dan pemeriksaan rutin penerapan standar fortifikasi pangan.	Fungsi Pemeriksaan
3.	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja UPT	Rendahnya partisipasi sekolah dalam program keamanan pangan.	Melakukan sosialisasi program dan penggalangan komitmen sekolah terhadap pelaksanaan dan implementasi Sekolah Pangan Aman.	Fungsi Infokom
		Terbatasnya dukungan desa terhadap penerapan keamanan pangan.	Penggalangan komitmen dan pembinaan desa secara bertahap dengan mengoptimalkan peran kader desa dalam mewujudkan keamanan pangan di desa.	Fungsi Infokom
		Lemahnya komitmen pengelola pasar dalam	Melaksanakan sosialisasi terkait pentingnya dampak	Fungsi Infokom

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		menerapkan keamanan pangan.	dari program pasar pangan aman kepada pengelola pasar dan komunitas pangan aman di pasar.	
4.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Rendahnya kesiapan dan pemahaman UMKM terhadap pemenuhan standar produksi.	Pendampingan teknis dan pembinaan berkelanjutan dalam penerapan CPPOB CPKB dan CPOTB.	Fungsi Pemeriksaan
5.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Kendala koordinasi lintas instansi dalam proses penegakan hukum.	Memperkuat kolaborasi dengan aparat penegak hukum melalui pemanfaatan intelijen secara optimal.	Fungsi Penindakan
6.	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Terbatasnya data dan informasi awal dalam analisis kasus kejahatan.	Penguatan sistem intelijen yang terintegrasi disertai peningkatan kompetensi analisis petugas.	Fungsi Penindakan
7.	Layanan Publik UPT yang prima	Penurunan kualitas layanan akibat kurang optimalnya implementasi SOP	Kaji ulang SOP dan sosialisasi pelaksanaan SOP layanan, melakukan	Fungsi Infokom dan Tata Usaha

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		layanan oleh petugas sehingga menurunkan nilai survey kepuasan masyarakat.	monitoring dan evaluasi terhadap petugas layanan, memberikan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> kepada petugas layanan.	
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Tidak tercapainya target pembangunan ZI menuju WBBM.	Penguatan tim kerja ZI, monitoring capaian komponen pengungkit, dan pelaporan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) triwulanan.	Seluruh Fungsi (Tata Usaha, Pemeriksaan, Pengujian, Infokom dan Penindakan)
		Kurangnya penerapan manajemen risiko secara menyeluruh di seluruh fungsi.	Sosialisasi, pendampingan, dan evaluasi berkala penerapan manajemen risiko.	Seluruh Fungsi (Tata Usaha, Pemeriksaan, Pengujian, Infokom dan Penindakan)

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

III.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM

Identifikasi potensi dan permasalahan (Analisis SWOT) yang telah dilakukan, memetakan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Kekuatan seperti kapasitas SDM, jaringan laboratorium, dan pemanfaatan teknologi menjadi modal penting. Di sisi lain, masih terdapat kelemahan seperti keterbatasan SDM di daerah dan ketimpangan sarana serta kemampuan laboratorium antar UPT. Peluang hadir melalui dukungan regulasi nasional, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kemajuan digitalisasi. Namun, BPOM juga menghadapi ancaman seperti peredaran produk ilegal, disinformasi, dan dinamika global yang mempengaruhi rantai pasok. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada penguatan sistem pengawasan secara nasional sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG: Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin.

Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat di dalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawasan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif

pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.

2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline: Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik online maupun offline.
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: BPOM fokus pada peningkatan *regulatory assistance* untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui *reliance* serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar

- untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik: BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan masyarakat.

Strategi Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data.

7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Tabel 3.1 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi BPOM 2025-2029

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis.	Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara <i>online</i> dan <i>offline</i> .	Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data.
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Memperhatikan bahwa pengarusutamaan gender dan inklusi sosial menjadi salah satu prinsip pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025-2045 maupun RPJMN Tahun 2025-2029, maka implementasi arah kebijakan dan strategi di atas dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.

III.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BBPOM DI BANDAR LAMPUNG

Berdasarkan hasil analisa SWOT BBPOM di Bandar Lampung mengambil strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang/kesempatan yang ada, karena dari sisi faktor internal, BBPOM di Bandar Lampung memiliki kekuatan yang lebih besar dari pada kelemahannya, sedangkan dari sisi eksternal peluang yang jauh lebih besar dari pada tantangan dalam rangka pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Perumusan strategi diperoleh melalui kombinasi faktor elemen S, W, O, dan T, sehingga menghasilkan beberapa kombinasi strategi sebagai berikut:

- a. Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko dengan sistem digital terintegrasi, mendorong pelaporan efek samping obat secara real-time; Penguatan farmakovigilans dengan pengawasan sarana distribusi yang ketat dan KIE farmakovigilans; dan penanganan Ancaman KLB Keracunan Pangan pada Program MBG dengan Penegakan Standar Keamanan Pangan MBG, pengujian sampel MBG, serta Respons Cepat KLB-KP.
- b. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor; Peningkatan kapasitas SDM; Edukasi Konsumen Mengenai Produk Impor Ilegal; dan Pemberdayaan Masyarakat untuk melaporkan temuan produk ilegal.
- c. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha untuk mendorong daya saing UMKM.
- d. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
- e. Memperkuat jejaring kerja dan kemitraan strategis dengan lintas sektor
- f. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data, melalui:
 1. Optimalisasi penggunaan teknologi dalam pelaksanaan proses bisnis dan peningkatan kapasitas SDM sesuai dengan analisis beban kerja.
 2. Melakukan investasi pada peralatan laboratorium mutakhir dan menerapkan sistem manajemen mutu internasional (ISO 17025) di semua laboratorium pengujian dan Menerapkan sistem regionalisasi laboratorium untuk optimalisasi fungsi dan spesialisasi pengujian.
 3. Integrasi Sistem Data Pengawasan dan Pencegahan serangan siber dengan SSL (Secure Socket Layer) https, Firewell, Antivirus Malware dan Update Software OS.
- g. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana secara optimal untuk mendukung peningkatan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dan pelayanan publik.

Tabel 3.2 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi BBPOM di Bandar Lampung
2025-2029

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis.	Penguatan peran pemerintah daerah dalam program pengendalian Anti Microbial Resistance (AMR); Penguatan farmakovigilans dengan pengawasan sarana distribusi yang ketat dan KIE farmakovigilans; dan penanganan ancaman KLB Keracunan Pangan pada Program MBG dengan Penegakan Standar Keamanan Pangan MBG, pengujian sampel MBG, serta Respons Cepat KLB-KP.
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara <i>online</i> dan <i>offline</i> .	Peningkatan koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam rangka efektivitas dan efisiensi kinerja penindakan yang optimal.
Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Pendampingan dan pembinaan secara intensif terhadap pelaku usaha UMKM untuk mendorong daya saing menuju pasar global.
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Peningkatan kesadaran masyarakat akan sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman melalui peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi agar masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang	Memperkuat jejaring kerja dan kemitraan strategis dengan lintas sektor melalui advokasi, forum

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	konsultasi publik, perjanjian kerja sama dan pengawasan bersama.
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Optimalisasi penggunaan teknologi dalam pelaksanaan proses bisnis dan peningkatan kapasitas SDM sesuai dengan analisis beban kerja; Melakukan investasi pada peralatan laboratorium mutakhir dan menerapkan sistem manajemen mutu internasional (ISO 17025) di semua laboratorium pengujian dan Menerapkan sistem regionalisasi laboratorium untuk optimalisasi fungsi dan spesialisasi pengujian; dan Integrasi Sistem Data Pengawasan dan Pencegahan serangan siber dengan SSL (<i>Secure Socket Layer</i>) <i>https</i> , <i>Firewell</i> , <i>Antivirus Malware</i> dan <i>Update Software OS</i> .
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana secara optimal serta peningkatan digitalisasi untuk mendukung peningkatan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dan pelayanan publik.

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM, maka implementasi arah kebijakan dan strategi BBPOM di Bandar Lampung dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.

Pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Bandar Lampung mencakup pengawasan pre dan post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun dalam hal ini pre-market control dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga

mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, balai tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM. Kegiatan secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut:

A. PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI SELURUH INDONESIA

1) Pemeriksaan fasilitas produksi sediaan farmasi dan pangan olahan;

Pemeriksaan fasilitas produksi di BBPOM di Bandar Lampung meliputi fasilitas produksi bahan obat, fasilitas produk darah di UTD, fasilitas UMKM Obat Bahan Alam, Fasilitas UMKM Kosmetik, Fasilitas Industri Pangan Olahan. Ruang lingkup pemeriksaan sarana produksi mencakup perencanaan pemeriksaan, persiapan pemeriksaan sarana, pelaksanaan pemeriksaan sarana, pelaporan, dan monitoring/tindak lanjut.

Prosentase fasilitas produksi yang paling besar di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung berupa industri pangan olahan. Pengawasan sarana produksi pangan olahan memiliki peran strategis karena selain untuk perlindungan kesehatan konsumen terhadap pangan olahan yang layak, aman, bermutu dan bergizi, juga berperan dalam meningkatkan daya saing mutu produk di pasar lokal maupun global. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan, BBPOM di Bandar Lampung juga melakukan pendampingan terhadap pembuatan CAPA hasil pemeriksaan.

2) Pemeriksaan fasilitas distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;

Pemeriksaan fasilitas distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dilakukan oleh BBPOM di Bandar Lampung terdiri dari:

- Fasilitas Distribusi atau Penyaluran Sediaan Farmasi adalah fasilitas/sarana yang digunakan untuk mendistribusikan atau menyalurkan Sediaan Farmasi, yaitu Pedagang Besar Farmasi dan Instalasi Sediaan Farmasi.
- Fasilitas Pelayanan Kefarmasian adalah fasilitas/sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, dan klinik.

- Fasilitas Lain adalah Fasilitas selain Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, dan memiliki kewenangan melakukan penyerahan Obat Bebas Terbatas dan Obat Bebas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Toko Obat.
- Fasilitas distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan.
- Fasilitas distribusi kosmetik.
- Fasilitas distribusi pangan olahan.

Pengawasan sarana distribusi bertujuan untuk memastikan bahwa sarana distribusi memenuhi ketentuan terhadap persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan produk yang diedarkan sesuai ketentuan yaitu memiliki izin edar. Proses pemeriksaan fasilitas distribusi dimulai dari perencanaan, penentuan target prioritas pengawasan berdasarkan analisis resiko, pelaksanaan pemeriksaan dan monitoring/tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan.

3) Sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan;

Pengawasan sarana produksi sebelum produk beredar ditujukan untuk memastikan sarana produksi telah memenuhi persyaratan cara produksi yang baik sehingga masyarakat akan mendapatkan produk yang aman dan bermutu. Dalam rangka pengawasan *premarket* terhadap sarana produksi, BBPOM di Bandar Lampung melakukan sertifikasi terhadap sarana dalam rangka pemenuhan standar Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) untuk komoditi pangan olahan, Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) bertahap untuk komoditi obat tradisional, Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (SPA CPKB) untuk komoditi kosmetik. Sedangkan untuk menjamin sarana distribusi melakukan distribusi sesuai ketentuan, BBPOM di Bandar Lampung melakukan sertifikasi terhadap Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) untuk produk obat dan surveilan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan yang Baik (SMKPO) untuk komoditi pangan olahan.

Selain itu pengawasan pemasukan produk impor dan ekspor sediaan farmasi dan pangan olahan juga menjadi bagian dari tugas BBPOM di Bandar Lampung,

diterbitkan dalam bentuk Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE).

4) Pendampingan Pelaku Usaha UMKM

UMKM berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Pertumbuhan UMKM berkembang pesat terutama saat pandemi melanda dunia termasuk Indonesia, salah satunya adalah UMKM yang bergerak di bidang pangan olahan, obat bahan alam dan kosmetik. Namun masih banyak kendala yang dihadapi UMKM antara lain rendahnya pengetahuan dan kemampuan UMKM dalam mengurus perizinan, rendahnya pemahaman UMKM dalam pemenuhan persyaratan dan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB), termasuk dalam pemenuhan persyaratan layout / denah bangunan. Pendampingan dan fasilitasi pelaku usaha UMKM sediaan farmasi dan pangan olahan diberikan oleh BBPOM di Bandar Lampung untuk percepatan pengembangan UMKM agar mampu berdaya saing di pasar nasional dan pasar global.

5) Sampling sediaan farmasi dan pangan olahan;

Salah satu bentuk pengawasan produk yang beredar dalam rangka melindungi masyarakat dari sediaan farmasi dan pangan olahan yang berisiko terhadap kesehatan dilakukan melalui sampling dan pengujian. Pelaksanaan sampling obat dilakukan berdasarkan kaidah statistik dan analisis risiko. Badan POM telah menyusun dan mengembangkan Pedoman Sampling. Strategi sampling dirumuskan dengan mempertimbangkan kaidah statistik, proporsi sampel, metode pengacakan, serta cara sampling yang benar sehingga mampu memberikan hasil yang valid dan representatif.

Sebagai upaya memperluas cakupan pengawasan dalam menjaring lebih banyak produk tidak memenuhi syarat di peredaran, dilakukan evaluasi dan strategi sampling secara berkala. Pengujian yang dilakukan oleh BPOM menerapkan konsep regionalisasi laboratorium untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sumber daya, meningkatkan kemampuan uji, dan mengatasi berbagai masalah terkait pengujian. Hasil pengujian yang tidak memenuhi syarat (TMS) akan dilakukan tindak lanjut berupa koordinasi dengan direktorat terkait dan pembinaan terhadap pelaku usaha jika sarana tersebut berada di dalam wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung.

6) Pemantauan label dan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan;

Pemberian label suatu produk bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang produk tersebut sebelum dibeli atau dikonsumsi oleh masyarakat. Pentingnya informasi label dalam produk maka perlu dilakukan pemantauan terhadap label produk yang beredar untuk memastikan bahwa label sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak menyesatkan masyarakat.

Iklan merupakan strategi pemasaran agar produk dikenal di masyarakat. Tujuan iklan merangsang perhatian, persepsi, sikap dan perilaku konsumen sehingga tertarik untuk membeli. Iklan didefinisikan sebagai keterangan atau pernyataan mengenai produk dalam bentuk gambar, tulisan, atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan atau perdagangan. Pengawasan iklan penting untuk dilakukan karena selain memberi manfaat, iklan juga memiliki risiko. Risiko terkait produk yakni terkait kandungan produk, legalitas serta klaim. Risiko lain yakni masih rendahnya literasi masyarakat yang memungkinkan terjadinya kesalahan penggunaan yang dapat berisiko terhadap kesehatan. BBPOM di Bandar Lampung melakukan pengawasan iklan pada berbagai media. Selain itu, meningkatnya peredaran produk sediaan farmasi dan pangan olahan terutama di media online, kecenderungan pembuatan iklan dengan klaim berlebihan, kreativitas pelaku pembuat iklan yang belum diiringi pemahaman regulasi, serta masyarakat yang sangat mudah terpengaruh informasi tidak benar juga membuat pengawasan terhadap iklan/promosi sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi sangat penting. Dengan dilakukannya pengawasan iklan diharapkan dapat memberikan dampak positif yakni informasi dan promosi yang beredar di pasaran/media sesuai dengan peraturan yang berlaku, meningkatkan daya saing produk sehingga dapat diterima di pasar lokal dan global, serta sebagai upaya perlindungan kesehatan bagi masyarakat.

7) Pengujian rutin sediaan farmasi dan pangan olahan;

Kegiatan pengujian dilakukan oleh substansi pengujian BBPOM di Bandar Lampung. Kegiatan pengujian sampel sediaan farmasi dan pangan olahan meliputi sampel rutin dalam rangka pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di wilayah Propinsi Lampung, yang diawali dengan kegiatan sampling sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar oleh substansi pemeriksaan. Selain pengujian terhadap sampel rutin, kegiatan

pengujian juga dilakukan terhadap sampel kasus dan sampel pihak ketiga (kepolisian, produsen atau lintas sektor). Dalam melaksanakan fungsi pengujian BBPOM di Bandar Lampung didukung oleh peralatan laboratorium yang memadai dan SDM yang kompeten serta metode pengujian yang tervalidasi untuk memastikan hasil uji dapat dipertanggungjawabkan. Laboratorium BBPOM di Bandar Lampung telah terakreditasi oleh KAN-BSN sejak 2009.

Keberhasilan pengujian BBPOM di Bandar Lampung diukur dengan pencapaian target indikator berikut:

- Persentase sediaan farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar
- Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
- Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
- Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar
- Nilai pemenuhan lab pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan BBPOM di Bandar Lampung sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

8) Pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan dalam rangka investigasi dan penyidikan;

Dalam rangka investigasi dan penyidikan, BBPOM di Bandar Lampung melakukan sampling terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan tanpa ijin edar yang diduga mengandung bahan yang dilarang ditambahkan/bahan berbahaya untuk dilakukan pengujian laboratorium.

9) Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan;

Pencegahan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Kegiatan Cegah Tangkal Kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk menurunkan atau mencegah terjadinya kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan. Fungsi cegah tangkal kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan dilaksanakan dalam bentuk pemetaan kerawanan, penyusunan analisis, dan penggalangan dalam rangka cegah tangkal kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan. BBPOM di Bandar Lampung melakukan 3 fungsi cegah tangkal kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan tersebut di wilayah

Provinsi Lampung. Pemetaan kerawanan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan bertujuan untuk melihat gambaran kejahatan yang telah terjadi dan memprediksi potensi kejahatan yang akan terjadi untuk digunakan sebagai bahan dalam merumuskan strategi cegah tangkal yang efektif dalam menurunkan atau mencegah kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan. Penyusunan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan dilakukan untuk menemukan akar permasalahan (*root cause*) timbulnya kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan menggunakan berbagai tools analisis sehingga dapat menghasilkan rekomendasi tindak lanjut sebagai bentuk cegah tangkal kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan. Kegiatan penggalangan merupakan bentuk cegah tangkal kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang bersifat aktif. Penggalangan didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk membuat, menciptakan, mengubah suatu kondisi yang menguntungkan dalam rangka cegah tangkal kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui kegiatan penggalangan, strategi cegah tangkal kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan dari kegiatan pemetaan kerawanan dan penyusunan analisis kejahatan dapat diwujudkan.

Intelijen Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Kegiatan Intelijen sediaan farmasi dan pangan olahan merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Petugas Intelijen dalam melakukan pencarian, pengumpulan, dan pengolahan data dan informasi terkait adanya dugaan tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan yang dilaksanakan secara mandiri dan memerlukan perencanaan khusus berdasarkan adanya laporan, data, informasi, hasil pemeriksaan, serta hasil pengamatan yang kejadiannya tidak dapat diprediksi sebelumnya secara tepat dan rinci waktu serta lokasinya. Peran Intelijen sediaan farmasi dan pangan olahan dibutuhkan guna meningkatkan pengawasan peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan secara premarket maupun postmarket. Petugas Intelijen BBPOM di Bandar Lampung dilengkapi dan difasilitasi dengan berbagai bentuk peralatan khusus Intelijen yang dipadukan dengan teknik dan taktik Intelijen serta pemanfaatan akses/ jaring Intelijen yang kemudian dirumuskan ke dalam produk Intelijen.

Penyidikan Tindak Pidana Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Operasi Pemberantasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Ilegal

BBPOM di Bandar Lampung melakukan operasi penindakan untuk menjamin keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkaya data hasil penindakan yang sangat penting untuk mengungkap modus operandi dan aktor intelektual kejahatan di Bidang sediaan farmasi dan pangan olahan.

Perkuatan Koordinasi dengan *Criminal Justice System*

Perkuatan koordinasi dan komunikasi dalam rangka upaya penegakkan hukum di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan dilakukan PPNS BBPOM di Bandar Lampung bersama CJS yang berkaitan dengan penindakan yaitu Korwas Polda Lampung, Kejaksaan Tinggi Lampung, Bea Cukai, dan lain-lain. Perkuatan kegiatan penyidikan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang memadai mengenai isu dan kendala penyidikan serta sebagai wadah perkuatan komunikasi dalam melaksanakan penegakkan hukum tindak pidana sediaan farmasi dan pangan olahan.

Pemantauan peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan melalui siber;

Kejahatan siber (*Cybercrime*) adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan termasuk ke dalam kejahatan dunia maya antara lain adalah penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit/carding, confidence fraud, penipuan identitas, pornografi anak, dan lain-lain. Kejahatan siber merupakan bentuk fenomena baru dalam tindak kejahatan sebagai dampak langsung dari perkembangan teknologi informasi, beberapa sebutan diberikan pada jenis kejahatan baru ini di dalam berbagai tulisan, antara lain: sebagai “kejahatan dunia maya” (*cyberspace/virtual-space offence*), dimensi baru dari “*hi-tech crime*”, dimensi baru dari “*transnational crime*”, dan dimensi baru dari “*white collar crime*”.

Pemantauan peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan melalui siber di BBPOM di Bandar Lampung adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran. Dengan perkembangan teknologi informasi, BPOM memanfaatkan sistem siber untuk memonitor peredaran produk tersebut secara lebih efektif dan efisien. Dengan pesatnya perkembangan

perdagangan elektronik (*e-commerce*), BBPOM di Bandar Lampung juga memantau peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang dijual melalui platform **e-commerce** berupa patroli siber. Pengawasan dengan cara ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk yang dipasarkan melalui toko daring tersebut memenuhi standar yang berlaku dan tidak mengandung bahan berbahaya atau ilegal. Patroli siber adalah proses, cara, kegiatan pengamatan/ pencatatan/ pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang berkaitan penyaluran dan /atau penyerahan sediaan farmasi dan pangan olahan dengan menggunakan media transaksi media elektronik dalam rangka perdagangan. Patroli siber adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk memantau dan mengawasi aktivitas di dunia maya yang berkaitan dengan peredaran produk-produk yang berada di bawah pengawasan BBPOM di Bandar Lampung. Hal ini mencakup peredaran Obat, Makanan, Kosmetik, Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diperdagangkan secara ilegal atau tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menanggulangi berbagai jenis pelanggaran. Akun-akun produk yang diedarkan pada platform *e-commerce* pada beberapa marketplace yang tidak memenuhi ketentuan keamanan, kemanfaatan dan mutu tersebut kemudian direkomendasikan untuk dilakukan *takedown*. Dalam hal ini BPOM berkoordinasi dengan Kominfo untuk mendukung upaya *takedown* tersebut. Kominfo bekerja sama dengan penyedia platform untuk penghapusan akun produk yang direkomendasikan *takedown* oleh BPOM.

10) Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;

Salah satu fungsi dari Badan POM adalah melakukan pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Sebagai salah satu pilar pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan sediaan farmasi dan pangan olahan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait sediaan farmasi dan pangan olahan. Untuk itu, BBPOM di Bandar Lampung melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada

masyarakat, BBPOM di Bandar Lampung perlu berupaya untuk selalu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, BBPOM di Bandar Lampung perlu secara aktif memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui berbagai forum dan media. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan aman, diharapkan akan mampu menimbulkan sikap dan perilaku yang mampu membentengi diri sendiri dari produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat.

Sebagai UPT BPOM, Balai Besar POM di Bandar Lampung dituntut untuk mampu memberi peningkatan pengetahuan kepada masyarakat terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan aman sehingga dapat memilih produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang benar yang dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Berbagai upaya perlu dilakukan guna meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan aman, melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat atau melalui kerjasama dengan eksternal/*stakeholder*. Dengan demikian masyarakat dapat meningkatkan pengetahuannya terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan aman dan terhindar dari kesalahan dalam memilih produk sediaan farmasi dan pangan olahan tidak memenuhi syarat yang dapat beresiko kesehatan.

Salah satu dalam pelayanan publik adalah melakukan pengelolaan pengaduan yang masuk dari masyarakat, pengelolaan dilakukan dengan memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan pengaduannya dan dijaga kerahasiannya, Pelaporan pengaduan masyarakat/*whistleblowing system* yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat. Pengelolaan pengaduan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan selalu dilakukan survey indeks pelayanan publik untuk mewujudkan kepuasan pelanggan

Kegiatan KIE BBPOM di Bandar Lampung dilaksanakan oleh substansi Infokom BBPOM di Bandar Lampung melalui KIE secara langsung/telpon dan berbagai media (media cetak, elektronik, medsos: *instagram, twiter, FB, subsite*). Kegiatan KIE kepada masyarakat bertujuan untuk memberikan bekal ilmu pengetahuan serta pemahaman kepada masyarakat tentang sediaan farmasi dan pangan olahan, sehingga masyarakat mampu melindungi diri dan keluarga dari sediaan farmasi dan pangan olahan yang beresiko terhadap kesehatan.

Keberhasilan KIE BBPOM di Bandar Lampung diukur dengan pencapaian beberapa target indikator berikut:

- Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung;
- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandar Lampung;
- Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan
- Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman;
- Jumlah desa pangan aman;
- Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya

11) Kerja sama di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:

Kerja Sama Dalam Negeri sepanjang tahun 2025-2029 akan tetap dilakukan bersama *stakeholder* terkait. Untuk pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan secara menyeluruh dan implementasi Program Prioritas Nasional akan dilakukan bersama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi lokus pengawasan di area Balai Besar Pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Bandar Lampung.

Selain itu Kerja Sama juga dilakukan dengan Perguruan Tinggi, organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan di wilayah Provinsi Lampung dalam bentuk Kesepakatan Bersama (MoU) maupun Perjanjian Kerja Sama (PKS), untuk memperluas sebaran informasi terkait sediaan farmasi dan pangan olahan. Untuk mempermudah pelayanan kepada pelaku usaha, sejak tahun 2023 BBPOM di Bandar Lampung telah memiliki 3 kesepakatan dengan Dinas PMPTSP (Kabupaten Lampung Tengah, Kota Metro dan Kota Bandar Lampung) untuk terlibat dan hadir langsung di Mal Pelayanan Publik.

Keseluruhan MoU dan PKS ini akan terus diupayakan implementasinya secara maksimal selama tahun 2025-2029, sesuai Rencana Aksi yang telah tertuang dalam Lampiran dokumen kerja sama. Monitoring dan Evaluasi juga akan dilakukan berkala untuk melihat efektifitas kerja sama.

Perluasan kerja sama akan dilakukan kepada 7 Kabupaten lainnya dalam hal pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP), dan kepada Perguruan Tinggi khususnya terkait Program Pangan Aman *Goes to Campus*.

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA BPOM

Untuk menjamin keberlangsungan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang optimal, Balai Besar POM di Bandar Lampung perlu memastikan ketersediaan, kelayakan, dan pemanfaatan sarana prasarana penunjang tugas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui pengelolaan sarana dan prasarana yang terencana, terimplementasi, dan termonitoring secara baik. Pengelolaan Sarana dan Prasarana yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Bandar Lampung melalui kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa yang Sesuai dengan Prinsip Pengadaan melalui pemanfaatan Produk Dalam Negeri, serta Penyelenggaraan Perdagangan melalui Sistem Elektronik untuk perdagangan barang dan jasa di lingkungan Balai Besar POM di Bandar Lampung.
- b. Peningkatan Kualitas Manajemen Aset BPOM, serta Optimalisasi Pengelolaan Sarana Prasarana yang diwujudkan melalui:
 1. Digitalisasi pengelolaan Barang Milik Negara melalui Aplikasi Elektronik Barang Milik Negara (E-BMN) yang terkoneksi dengan aplikasi eksternal BPOM dan aplikasi internal BPOM dan;
 2. Inventarisasi rutin barang milik negara yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali untuk meminimalisir Barang Tidak Ditemukan dan untuk menelusuri barang NUP.
- c. Peningkatan Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar yang diwujudkan melalui pengadaan sarana prasarana yang memanfaatkan energi ramah dalam menghadapi globalisasi;
- d. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) yang diwujudkan melalui Penatalaksanaan arsip melalui digitalisasi arsip.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

IV.1 TARGET KINERJA

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan oleh BBPOM di Bandar Lampung untuk periode 2025-2029, disusunlah matriks kinerja yang akan menjadi sasaran akhir BBPOM di Bandar Lampung dalam memperkuat pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di Provinsi Lampung. Matriks ini memuat Sasaran Kegiatan BBPOM di Bandar Lampung, serta indikator kinerja dan target-target spesifik yang telah dirancang untuk memastikan pencapaian perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Setiap indikator dan target yang tercantum dalam matriks ini merupakan komponen penting yang menggambarkan hasil akhir yang ingin diraih BBPOM di Bandar Lampung selama periode lima tahun. Oleh karena itu, seluruh unit kerja di BBPOM di Bandar Lampung diharapkan menjadikan matriks ini sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Setiap langkah strategis yang diambil selama periode 2025-2029 diarahkan untuk mencapai sasaran akhir ini, sehingga pengawasan yang dilakukan benar-benar efektif dalam mencegah peredaran produk yang berisiko bagi kesehatan masyarakat dan menjamin standar keamanan yang tinggi.

Tabel 4.1 Matriks Kerangka Kinerja BBPOM di Bandar Lampung 2025-2029

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88,75	90,00	91,25	92,50	93,75
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	27	28	29	30

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Bandar Lampung	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	89	92	95
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	79	80	81	82	83
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,5	92	93,5	95	96,5
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,50	95,50	96,50	97,50	98,50
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	93	94	95	96
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,73	95,13	96,53	97,93	99,00
		Persentase Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	92	93	94	95
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah BBPOM di Bandar Lampung	100	100	100	100	100
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Bandar Lampung sesuai	77,2	81,2	84,9	86,6	88,1

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Standar Kemampuan Laboratorium					
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20	40	60	80	100
		Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		81	82	83	84
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	65	68	73	78	81
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	89,60	90,50	91,40	92,29	93,19
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	12	15	18	20	22

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Jumlah desa pangan aman	5	7	7	7	8
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	2	2	2	2
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	16,94	35,48	55,65	77,42	100
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Bandar Lampung	85	86	87	88	89
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	91	92	93	94

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung						
7	Layanan Publik BBPOM di Bandar Lampung yang prima	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandar Lampung	4,70	4,75	4,80	4,85	4,90
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT	90	91	92	93	94
		Nilai AKIP BBPOM di Bandar Lampung	80,90	81,40	81,90	82,40	82,90
		Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandar Lampung	5	5	5	5	5
		Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Bandar Lampung	2,90	2,95	3,00	3,05	3,10

IV.2 KERANGKA PENDANAAN

Untuk mendukung berjalannya program dan kegiatan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, maka perlu didukung oleh anggaran pembangunan yang memadai. Kerangka pendanaan yang dibutuhkan dalam lima tahun ke depan terlampir dalam matriks berikut.

Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan BBPOM di Bandar Lampung 2025-2029
Berdasarkan Kegiatan

Kegiatan	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	21.121,903	23.234,093	25.557,503	28.113,253	30.924,578
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan	11.707,584	12.878,342	14.166,177	15.582,794	17.141,074
TOTAL	32.829,487	36.112,435	39.723,690	43.696,047	48.065.652

Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan BBPOM di Bandar Lampung 2025-2029
Berdasarkan Sumber Dana

Program	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni (RM)	31.249,487	34.532,436	38.143,679	42.116,047	46.485,652
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
TOTAL	32.829,487	36.112,436	39.723,679	43.696,047	48.065,652

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang menjadi landasan dan pedoman utama bagi BBPOM di Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Renstra BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan SK Kepala Badan POM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM dan dijadikan acuan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta diharapkan dapat dilaksanakan dengan akuntabel, berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi sampai pada level individu. Keberhasilan implementasi Renstra ini sangat bergantung pada komitmen, sinergi, dan kerja sama yang solid dari seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, termasuk pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat.

Dengan ditetapkannya Renstra ini, BBPOM di Bandar Lampung bertekad untuk mewujudkan visi dan misi dalam melindungi masyarakat Indonesia melalui jaminan sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat. Semoga Rencana Strategis BPOM Tahun 2025-2029 ini dapat terlaksana dengan baik dan memberikan kontribusi yang optimal bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

**KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG**



BAGUS HERI PURNOMO, S.SI., APT.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BBPOM DI BANDAR LAMPUNG

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit
									(Dalam Juta Rupiah)					Organisasi
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	Pelaksana
Balai Besar POM di Bandar Lampung								32.829,487	36.112,436	39.723,679	43.696,047	48.065,652	UPT BPOM	
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia								11.707,584	12.878,342	14.166,177	15.582,794	17.141,074	UPT BPOM	
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT												UPT BPOM	
	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Bandar Lampung	88,75	90,00	91,25	92,50	93,75						UPT BPOM
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	BBPOM di Bandar Lampung	26	27	28	29	30						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit
									(Dalam Juta Rupiah)					Organisasi
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	Pelaksana
Balai Besar POM di Bandar Lampung									32.829,487	36.112,436	39.723,679	43.696,047	48.065,652	UPT BPOM
	3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Bandar Lampung	91	92	93	94	95						UPT BPOM
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	BBPOM di Bandar Lampung	100	100	100	100	100						UPT BPOM
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Bandar Lampung	85	87	89	92	95						UPT BPOM
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	BBPOM di Bandar Lampung	79	80	81	82	83						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit
									(Dalam Juta Rupiah)					Organisasi
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	Pelaksana
Balai Besar POM di Bandar Lampung									32.829,487	36.112,436	39.723,679	43.696,047	48.065,652	UPT BPOM
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Bandar Lampung	90,5	92	93,5	95	96,5						UPT BPOM
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Bandar Lampung	91	92	93	94	95						UPT BPOM
	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Bandar Lampung	94,50	95,50	96,50	97,50	98,50						UPT BPOM
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan	BBPOM di Bandar Lampung	92	93	94	95	96						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit
									(Dalam Juta Rupiah)					Organisasi
	2025	2026		2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	Pelaksana		
Balai Besar POM di Bandar Lampung								32.829,487	36.112,436	39.723,679	43.696,047	48.065,652	UPT BPOM	
		ditindaklanjuti sesuai ketentuan												
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	BBPOM di Bandar Lampung	93,73	95,13	96,53	97,93	99,00						UPT BPOM
	12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	BBPOM di Bandar Lampung	91	92	93	94	95						UPT BPOM
	13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	BBPOM di Bandar Lampung	100	100	100	100	100						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit
									(Dalam Juta Rupiah)					Organisasi
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	Pelaksana
Balai Besar POM di Bandar Lampung									32.829,487	36.112,436	39.723,679	43.696,047	48.065,652	UPT BPOM
	14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	BBPOM di Bandar Lampung	77,2	81,2	84,9	86,6	88,1						UPT BPOM
	15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	BBPOM di Bandar Lampung	20	40	60	80	100						
	16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Bandar Lampung		81	82	83	84						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Target					Alokasi					Unit
	Kegiatan/Indikator/Rincian							Output	(Dalam Juta Rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029
Balai Besar POM di Bandar Lampung								32.829,487	36.112,436	39.723,679	43.696,047	48.065,652	UPT BPOM
	RO 1: Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans		45	45	45	45	45						UPT BPOM
	RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT		439	439	440	440	460						UPT BPOM
	RO 3: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT		1.085	1.095	1.152	1.210	1.275						UPT BPOM
	RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		124	125	138	151	165						UPT BPOM
	RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		642	663	697	732	770						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi					Unit
													Organisasi
			2025	2026	2027	2028	2029	(Dalam Juta Rupiah)					Pelaksana
	Balai Besar POM di Bandar Lampung							32.829,487	36.112,436	39.723,679	43.696,047	48.065,652	UPT BPOM
	RO 6: Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa yang diperiksa sesuai standar oleh UPT BPOM		204	204	204	216	216						UPT BPOM
	RO 7: Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia		1	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 8: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		1	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 9: Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		1	1	1	1	1						

Kegiatan	Sasaran		Lokasi	Target					Alokasi					Unit
	Kegiatan/Indikator/Rincian Output								(Dalam Juta Rupiah)					Organisasi
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	Pelaksana
Balai Besar POM di Bandar Lampung								32.829,487	36.112,436	39.723,679	43.696,047	48.065,652	UPT BPOM	
	RO 10: Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar			-	838	838	838	838						UPT BPOM
	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi													UPT BPOM
	1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		65	68	73	78	81						UPT BPOM
	RO 1: Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT			24	25	27	29	30						UPT BPOM
	Meningkatnya efektivitas KIE													UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit
									(Dalam Juta Rupiah)					Organisasi
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	Pelaksana
Balai Besar POM di Bandar Lampung									32.829,487	36.112,436	39.723,679	43.696,047	48.065,652	UPT BPOM
	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT		89,60	90,50	91,40	92,29	93,19						UPT BPOM
	2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		12	15	18	20	22						UPT BPOM
	3	Jumlah desa pangan aman		5	7	7	7	8						UPT BPOM
	4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		1	2	2	2	2						UPT BPOM
	RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE			9.283	9.400	9.500	9.600	9.700						UPT BPOM, Dit. PMPU OTSKK, & Dit. PMPU Pangan Olahan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit
									(Dalam Juta Rupiah)					Organisasi
	2025	2026		2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	Pelaksana		
Balai Besar POM di Bandar Lampung								32.829,487	36.112,436	39.723,679	43.696,047	48.065,652	UPT BPOM	
	RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT			31	17	19	21	24						UPT BPOM
	RO 3: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan			12	15	18	20	22						UPT BPOM
	RO 4: Desa Pangan Aman			5	7	7	7	8						UPT BPOM
	RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas			1	2	2	2	2						UPT BPOM
	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu													UPT BPOM
	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan		16,94	35,48	55,65	77,42	100						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit
									(Dalam Juta Rupiah)					Organisasi
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	Pelaksana
Balai Besar POM di Bandar Lampung									32.829,487	36.112,436	39.723,679	43.696,047	48.065,652	UPT BPOM
		OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan												
		RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT		21	23	25	27	28						UPT BPOM
		Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT												UPT BPOM
	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT		85	86	87	88	89						UPT BPOM
		RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan		3	3	3	4	4						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit
									(Dalam Juta Rupiah)					Organisasi
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	Pelaksana
Balai Besar POM di Bandar Lampung									32.829,487	36.112,436	39.723,679	43.696,047	48.065,652	UPT BPOM
	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT													UPT BPOM
	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar		90	91	92	93	94						UPT BPOM
	RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT			14	14	15	15	15						UPT BPOM
	Layanan Publik UPT yang prima													UPT BPOM
	1	Indeks Pelayanan Publik UPT		4,70	4,75	4,80	4,85	4,90						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran		Lokasi	Target					Alokasi					Unit
	Kegiatan/Indikator/Rincian								(Dalam Juta Rupiah)					Organisasi
	Output			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	Pelaksana
Balai Besar POM di Bandar Lampung								32.829,487	36.112,436	39.723,679	43.696,047	48.065,652	UPT BPOM	
	RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT			526	691	705	721	747						UPT BPOM
	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal													UPT BPOM
	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM		90	91	92	93	94						UPT BPOM dan Direktorat Kedeputian 1,2,3,4
	2	Nilai AKIP UPT BPOM		80,90	81,40	81,90	82,40	82,90						UPT BPOM
	3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM		5	5	5	5	5						UPT BPOM
	4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM		2,90	2,95	3,00	3,05	3,10						UPT BPOM dan Direktorat

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit
									(Dalam Juta Rupiah)					Organisasi
	2025	2026		2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	Pelaksana		
Balai Besar POM di Bandar Lampung								32.829,487	36.112,436	39.723,679	43.696,047	48.065,652	UPT BPOM	
													Kedeputian 1,2,3,4	
	RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			1	1	1	1	1						UPT BPOM dan Deputi 1,2,3,4
	RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia			1	-	1	1	1						UPT BPOM
	RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi			8	-	9	10	11						UPT BPOM
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM									21.121,903	23.234,093	25.557,503	28.113,253	30.924,578	UPT BPOM
	RO 4: Layanan BMN Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"			1	1	1	1	1						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi					Unit
													Organisasi
			2025	2026	2027	2028	2029	(Dalam Juta Rupiah)					Pelaksana
	Balai Besar POM di Bandar Lampung							32.829,487	36.112,436	39.723,679	43.696,047	48.065,652	UPT BPOM
	RO 5: Layanan Perkantoran Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"		1	1	1	1	1						UPT BPOM

"Strategi tanpa rencana hanyalah mimpi, dan rencana tanpa aksi hanyalah angan. Rencana strategis menyatukan keduanya untuk menciptakan dampak nyata."



"Rencana strategis adalah peta yang membimbing perjalanan menuju tujuan besar. Tanpa arah yang jelas, kesuksesan hanya akan menjadi kebetulan."

BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG

Jl. Dr. Susilo 105 Pahoman, Bandar Lampung.35213.
Telp. 0721-3738056, 0721-3738066,
Call Me Back : 082180806008,
Email : bpom_lampung@pom.go.id

